



PEMERINTAH
KAB. LUWU TIMUR



LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)

SEMESTER I T.A 2024



BADAN
PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Hubungi Kami...



(0474) 321 - 419



www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id



ppmbapelitbangdaluwutimur@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya serta kesehatan yang selalu menyertai sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Semester I sampai 30 Juni Tahun 2024, merupakan penggambaran umum mengenai perkembangan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, disusun untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak dan tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja TKPKD Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Malili, Juni 2024
Sekretaris TKPK Kab. Luwu Timur
Kepala Bapelitbangda

Drs. DOHRI AS'ARI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670912 198811 1 003

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. KONDISI UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR		10
2.1. Kondisi Umum Daerah	10
2.1.1. Aspek Gografis	10
2.1.2. Demografi	18
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.....		20
2.1.4. Ketenagakerjaan.....		31
2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	34
2.2.1. Pertumbuhan PDRB	34
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi	38
2.3. Laju Inflasi	42
2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	44
2.5. Pendidikan	46
2.5.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	47



2.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM)	49
2.6. Kesehatan	50
2.6.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	51
2.6.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	53
2.6.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	53
2.6.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup.....	54
2.6.5. Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	55
BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN...	57
3.1. Profil Kemiskinan	57
3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	61
3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	65
3.1.3 Perbandingan dengan Angka Kemiskinan Proinsi Sulawesi Selatan	66
3.2. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun Anggaran 2024	70
3.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	76
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	79
3.4.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	79
3.4.2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022	80
3.4.3 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81
3.4.4 Perubahan Pendapatan Transper	87
3.4.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	89
3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Semester I Triwulan II Sampai 30 Juni Tahun 2024.....	92



BAB IV KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM	113
PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
4.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	113
4.2. Permasalahan Pelaksaaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	114
4.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	115
4.4. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program	
Penanggulangan Kemiskinan	116
BAB V PENUTUP	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program	
Penaggulangan Kemiskinan	119



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Andi Jemma,2023.....	18
Tabel 2.2.	Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	19
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur (jiwa) tahun 2023.....	20
Tabel 2.4.	Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur.....	21
Tabel 2.5	Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur	23
Tabel 2.6	Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur.....	24
Tabel 2.7	Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur.....	25
Tabel 2.8	Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur.....	29
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	33
Tabel 2.10	Presenatase Jumlah Penduduk menurut angkatan kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023.....	33
Tabel 2.11	Produk Domestik Reginal Bruto Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2023.....	36
Tabel 2.12	PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	37
Tabel 2.13	Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (persen),Tahun 2020–2023.....	40
Tabel 2.14	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut KomponenTahun 2018- 2022.....	45
Tabel 2.15	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018 - 2022 Kabupaten Luwu Timur.....	48
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar 2022 menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur.....	48
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Murni Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Luwu Timur....	49



Tabel 2.18	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	52
Tabel 2.19	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Luwu Timur 2018-2022.....	53
Tabel 2.20	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 2.21	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	54
Tabel 2.22	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022.....	55
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Kab. Luwu Timur Prov. Sul-Se Nasional Tahun 2019 s.d 2023.....	64
Tabel 3.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, Maret 2022.....	64
Tabel 3.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Luwu Timur, 2018 – 2023	66
Tabel 3.4	Perbandingan Angka Kemiskinan Kab. Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023	68
Tabel 3.5	Data Sasaran Per Kecamatan Menurut Jumlah Keluarga Desil 1 Kab. Luwu Timur Tahun 2024.....	72
Tabel 3.6	Perubahan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	81
Tabel 3.7	Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023	84
Tabel 3.8	Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 3.9	Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	89
Tabel 3.10	Perangkat Daerah Penopang Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	90
Tabel 3.11	Realisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kab. Luwu Timur Semester I Tahun 2024.....	92



DAFTAR GRAFIK

Grafik. 2.1	Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur(%), 2023....	12
Grafik. 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur 2019 s.d 2023 (persen..	39 39
Grafik. 2.3	Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023.....	39
Grafik. 2.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur – Prov. Sul-Sel – Nasional Tahun 2019 s.d 2023 (Persen).....	41
Grafik. 2.5	Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2019-2023 (persen).....	43
Grafik. 2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2019-2023.....	45
Grafik. 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur 2019 – 2023	62
Grafik. 3.2	Garis Kemiskinan Luwu Timur, 2017-2023.....	63
Grafik. 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-Luwu Raya Tahun 2019 s.d 2023.....	63
Grafik. 3.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2019 – 2023 (persen)	67
Grafik. 3.5	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se- Luwu Raya Tahun 2019 - 2023	69
Grafik. 3.6	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Kabupaten Luwu Timur- Prv.Sul-Sel – Nasional Tahun 2019 – 2023	69
Grafik. 3.7	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Luwu Timur dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2019 – 2023	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur.....	11
Gambar. 3.1	Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia	59



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar belakang

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi disetiap Wilayah Indonesia. Tingginya angka kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan Multidimensional mengingat komposisi penduduk yang beragam status sosial dan ekonomi serta kondisi geografisnya, sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemangku kepentingan secara terpadu, masyarakat maupun dunia usaha sebagai salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan melakukan pendekatan strategi dan program penanggulangan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. terhambatnya pendidikan maupun pelayanan kesehatan, berakibat produktivitas juga rendah dan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang sistematis, yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Dalam rangka akselerasi dan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 166 / F-02/ V / Tahun 2023, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan



Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Tim tersebut mempunyai tugas dan melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan, baik lintas sektor maupun lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain itu juga diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan di tingkat Nasional, di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Program Penanggulangan Kemiskinan mejadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan disetiap Kabupaten Kota.

Berdasarkan amanat UUD 45, sebagai konstitusi bagi pencapaian pengentasan kemiskinan Nasional yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan *Millenium* (*Millenium Development Goals/ MDGs*) yang telah dintegrasikan dalam Rencana Pemabangunan Nasional Jangka Pendek maupun Menengah. Sebagai pengganti (*Millenium Development Goals/ MDGs*) maka diluncurkan suatu sistem Pembangunan baru yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi acuan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan Nasional maupun daerah. Ada 17 kesepakatan dalam SDGs sadalah “Mengakhiri



Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Mana Pun ”(*Endpovertyin all itsformseverywhere*). Kemiskinan dilihat dalam kerangka multi dimensi, karena kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain:

- a. Kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin;
- b. Menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartaba.

Gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka akselerasi dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diukur melalui empat point : *Pertama* kemiskinan penting untuk diukur agar penduduk atau kelompok masyarakat miskin tetap masuk dalam agenda pembangunan secara menyeluruh, diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan secara berkesinambungan. *Kedua*, kemiskinan penting untuk diukur supaya kemiskinan tetap menjadi salah satu target intervensi kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu dimensinya adalah tingkat kemiskinan. *Ketiga*, kemiskinan penting untuk diukur agar monitoring dan evaluasi terhadap program-program maupun intervensi kebijakan dapat dilakukan. Kemiskinan yang juga merupakan efek dari pembangunan yang dijadikan sebagai indikator, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan. Keempat, kemiskinan penting diukur untuk menilai efektivitas kinerja kelembagaan setiap kegiatan dan program-program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan menunjang kesejahteraan masyarakat.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana capaian pelaksanaan, pengendalian dan capaian program-program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program maupun Anggaran Belanja yang digunakan OPD terkait dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) yaitu :

1. Memberikan informasi kepada TNP2K dan TKPK Kabupaten Luwu Timur tentang kondisi kemiskinan di daerah melalui berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah diprioritaskan;
2. Memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur kepada pemangku kepentingan;
3. Mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (Program, Anggaran dan Regulasi).
4. Menjelaskan pelaksanaan kebijakan yang meliputi program, anggaran, dan regulasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta capaiannya yang dihasilkan setiap OPD terkait dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur;
5. Merumuskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan



yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Luwu Timur yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1059 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- i. Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 25 Ayat 1 : Rakor TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau se waktu waktu sesuai dengan kebutuhan
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);



- k. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 166/F-02/V/Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023
- l. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 407/F-02 /XII/Tahun 2023 Tentang Penetapan Data By Name By Address Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Tahun 2016 Nomor 3);



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah LP2KD Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan ini serta landasan hukum yang mendasari kegiatan penanggulangan kemiskinan, sekaligus menggambarkan output yang ingin dicapai dari penyusunan laporan ini, yakni sebagai bahan informasi dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun berjalan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Menggambarkan kondisi umum Kabupaten Luwu Timur berdasarkan beberapa bidang yang dapat menggambarkan keadaan kemiskinan daerah secara umum, data jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur, perkembangan tingkat kemiskinan, perubahan garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur.

BAB III : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menjelaskan beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Semester I sampai dengan 30 Juni Tahun 2024 , beserta jenis-jenis sumber Pendanaan Program dan Kegiatan



Penanggulangan Kemiskinan, serta penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV : KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Menjelaskan beberapa kegiatan rapat koordinasi TKPK Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan Tahun 2024, Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2024, dan agenda kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang perlu menjadi catatan untuk ditindak lanjuti tahun mendatang dalam upaya perbaikan kualitas kebijakan dan program-program untuk percepatan pencapaian target pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.



BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. Gambaran umum dan kondisi daerah di Kabupaten Luwu Timur tercermin dari uraian beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah berikut penjabaran gambaran umum dari keseluruhan Aspek diatas.

Gambaran umum dan kondisi daerah di Kabupaten Luwu Timur tercermin dari uraian beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah berikut penjabaran gambaran umum dari keseluruhan Aspek diatas.

2.1.1. Aspek Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu



Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 15,19 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



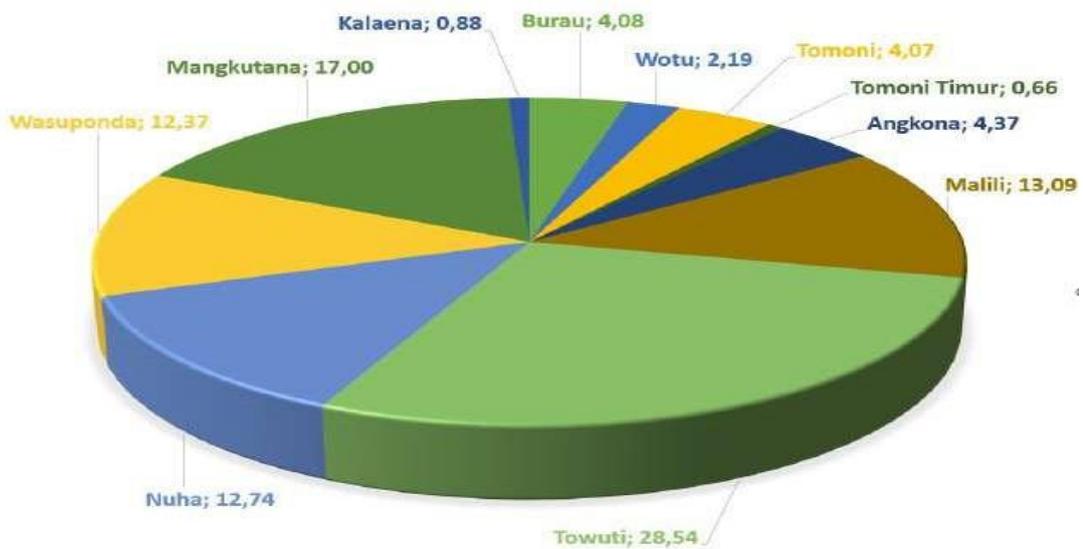
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, tahun 2023

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Bura dengan 18 desa, Wotu dengan 17 desa, Tomoni dengan 12 desa dan 1 Kelurahan, Tomoni Timur dengan 8 Desa, Angkona dengan 10 Desa, Malili dengan 14 desa dan 1 kelurahan, Towuti dengan 18 Desa, Nuha dengan 4 Desa dan 1 Kelurahan, Wasuponda dengan 6 Desa, Mangkutana dengan 11 Desa, dan Kalaena dengan 7 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.926,13 km² atau sekitar 28,54 dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan kecamatan Kalaena memiliki luas terkecil yaitu 59,08



km² atau 0,88 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Grafik 2.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur(%), 2023



Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luasnya 243,1 Ha), dan Lontoa (luasnya 171,5 Ha).



2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ LS dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah Selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah Barat.

Secara geografis, sesungguhnya posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa provinsi, sejumlah kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Dengan menerapkan konsep ini, Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperoleh kemanfaatan yang lebih besar akibat posisi geografis-strategis tersebut.

Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian, wisata perairan dan sebagai sumber energi.

3. Topografis

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran rendah hingga rawarawa. Wilayah wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan



kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan, hal ini menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m, 25 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000 m dan >1000 m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

4. Geologi

Kondisi geologi wilayah Luwu Timur diuraikan berdasarkan tinjauan geomorfologi, stratigrafi dan struktur geologi sebagai berikut :

a. Geomorfologi

Morfologi daerah ini dapat dibagi atas 4 satuan, yakni: Daerah pegunungan, Daerah Perbukitan, Daerah Karst dan Daerah Pedataran anatara lain :

- 1) Daerah pegunungan menempati bagian barat dan tenggara pada lembar Buyu Baliase, Salindu, Lawangke, Pendolo, Mangkutana dan Rauta, Ballawai, Ledu ledu dan Tapara Masapi. Pada bagian tenggara lembar peta terdapat Pegunungan Verbeck dengan ketinggian 800-1346 mdpl, dibentuk oleh batuan ultramafik dan batugamping meliputi lembar Ledu-Ledu, Tara Masapi, Malili, Tolala dan Rauta. Puncak-puncaknya antara lain G. Tambake (1838 m), bulu Nowinokel (1700 m), G. Kaungabu (1760 m), Bulu Taipa (1346 m), Bulu ladu (1274 m), Bulu Burangga (1032 m) dan Bulu Lingke (1209 m). Sungai-sungai yang mengalir di daerah ini yaitu



S. Kalaena, S. Pincara, S. Larona dan S. Malili merupakan sungai utama. Pola aliran sungai umumnya dendritik.

- 2) Daerah perbukitan menempati bagian meliputi lembar Bone-Bone, Mangkutana, Wotu sebagian lembar Malili, dengan ketinggian antara 200-700 mdpl dan merupakan perbukitan yang agak landai yang terletak di antara daerah pegunungan dan daerah pedataran. Perbukitan ini dibentuk oleh batuan vulkanik, ultramafik dan batupasir. Puncak-puncak bukit yang terdapat di daerah ini diantaranya Bulu Tiruan (630 m), Bulu Tambunana (477 m) dan Bulu Bukila (645 m).
- 3) Daerah karst menempati bagian timur laut pada peta lembar Matano dengan ketinggian antara 800-1700 mdpl dan dibentuk oleh batu gamping. Daerah ini dicirikan oleh adanya *dolina*, "*sinkhole*" dan sungai bawah permukaan. Puncak yang tinggi di daerah ini di antaranya Bulu Empenai (1185 m).
- 4) Daerah pedataran menempati daerah selatan semua lembar peta, menghampar mulai dari utara Bone-bone, Wotu dan Malili. Daerah ini mempunyai ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut dan dibentuk oleh endapan aluvium. Pada umumnya merupakan daerah pemukiman dan pertanian yang baik. Sungai yang mengalir di daerah ini di antaranya Sungai Salonoa, Sungai Angkona dan Sungai Malili, menunjukkan proses berkelok.
- 5) Sungai-sungai yang bersumber di daerah pegunungan mengalir melewati daerah ini terus ke daerah pedataran dan bermuara di Teluk Bone. Pola alirannya dendrit. Terdapatnya pola aliran subdendritik dengan air terjun di beberapa tempat, terutama di daerah pegunungan, aliran sungai yang deras, serta dengan memperhatikan dataran yang agak luas di bagian



selatan peta dan adanya perkelokan sungai utama, semuanya menunjukkan morfologi dewasa.

b. Stratigrafi

Berdasarkan himpunan satuan batuan, struktur dan biostratigrafi, secara regional lembar Malili termasuk dalam Mandala Geologi Sulawesi Timur dan Mandala Geologi Sulawesi Barat dibatasi oleh sesar Palu Koro yang membujur hampir utara – selatan. Mandala Geologi Sulawesi Timur dapat dibagi menjadi dua jalur (*belt*) : lajur batuan malihan dan lajur ofiolit Sulawesi Timur yang terdiri dari batuan ultramafik dan batuan sedimen pelagos mesozoikum. Mandala Geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunung api Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen flysch Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparannya Sunda).

Mandala Geologi Sulawesi Timur, berdasarkan jenis batuannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) batuan ofiolit, 2) lajur metamorfik, 3) kompleks batuan campur aduk.

- 1) Batuan Ofiolit; Merupakan batuan tertua di lembar ini, terdiri dari ultramafik termasuk harsburgit, dunit, piroksenit, wehrlit dan serpentinit, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basal. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur – Awal Tersier (Simandjuntak, 1986).
- 2) *Lajur metamorfik, kompleks pompangeo*; Terdiri dari berbagai jenis sekis hijau di antaranya sekis mika, sekis hornblende, sekis glaukupan, filit, batusabak, batugamping terdaunkan atau pualam dan setempat breksi. Umurnya diduga tidak lebih tua dari Kapur. Di atas ofiolit diendapkan tak selaras Formasi Matano ; bagian atas berupa batugamping kalsilutit, rijang radiolaria, argilit dan batulempung napalan, sedangkan bagian bawah



terdiri dari rijang radiolaria dengan sisipan kalsilutit yang semakin banyak ke bagian atas. Berdasarkan kandungan fosil formasi ini menunjukkan umur Kapur.

- 3) *Komplek batuan buncah (Melange Wasuponda)*; Terdiri dari bongkahan asing batuan mafik, serpentinit, pikrit, rijang, batugamping terdaunkan, sekis, amfibolit dan eklogit berbagai ukuran yang tertanam di dalam massa dasar lempung merah bersisik. Batuan tektonika ini tersingkap baik di daerah Wasuponda serta di daerah Ensa, Koro Mueli dan Petumbea, diduga terbentuk sebelum Tersier (Simandjuntak, 1980).
- 4) Pada Kala Miosen Akhir batuan sedimen pasca orogenesis Neogen (kelompok Molasa Sulawesi) diendapkan tak selaras di atas batuan yang lebih tua. Kelompok ini termasuk Formasi Tomata yang terdiri dari klastika halus sampai kasar, dan Formasi Larona yang umumnya terdiri dari klastika kasar yang diendapkan dalam lingkungan dangkal sampai darat. Pengendapan ini terus berlangsung sampai Kala Pliosen.

c. Klimatologi

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2023, rata-rata hari hujan perbulan sebanyak 20 hari. Bulan Maret dan Bulan Juli memiliki jumlah hari hujan tertinggi hingga 26 hari dalam sebulan. Jumlah rata-rata hari hujan setiap bulan antara 11-26 hari. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Andi Jemma, 2023

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) Number of Precipitation (mm/year)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari (jam) Duration of Sunshine (hour)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	277,70	19	6,6
Februari/February	167,10	15	5,6
Maret/March	370,90	26	4,2
April/April	460,70	24	2,3
Mei/May	426,10	20	4,6
Juni/June	267,50	25	5,0
Juli/July	144,30	26	4,2
Agustus/August	199,30	20	4,4
September/September	156,50	11	3,9
Oktober/October	72,20	11	4,4
November/November	326,30	19	5,8
Desember/December	240,30	19	7,6

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tahun 2023

2.1.2. Demografi

1. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua Suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua Wilayah Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022- 2023 (kondisi pertengahan tahun/ Juni)



sebanyak 305.521 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,02. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebanyak 5.061 atau sebesar 1,67 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mencapai 43,99 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 312,94 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,28 jiwa/km².

Jumlah penduduk Tahun tahun 2022 berdasarkan Kecamatan dan jenis Kelamin terhadap sex ratio berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2

Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (jiwa) Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 Annual Population Growth Rate (%)	Persentase Penduduk (%) Percentage of Total Population (%)	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Burau	35.655	1,58	11,38	129,47	102,16
Wotu	34.723	2,94	11,08	235,19	99,82
Tomoni	27.727	3,56	8,85	100,94	102,85
Tomoni Timur	13.900	1,84	4,44	309,85	104,32
Angkona	25.814	2,02	8,24	87,53	104,40
Malili	45.853	5,60	14,63	51,89	107,10
Towuti	48.076	10,27	15,34	24,96	112,58
Nuha	24.486	3,08	7,81	28,48	117,36
Wasuponda	22.357	1,74	7,13	26,78	113,37
Mangkutana	22.551	0,51	7,20	19,66	102,40
Kalaena	12.262	-0,28	3,91	207,55	100,85
Luwu Timur	313.404	3,76	100,00	46,44	106,37

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Semester II Tahun 2023

**Tabel. 2.3**

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu Timur (jiwa) tahun 2023

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13.673	12.548	26.221
5-9	15.609	14.401	30.010
10-14	15.683	14.475	30.158
15-19	12.222	11.841	24.063
20-24	15.493	14.557	30.050
25-29	13.581	12.761	26.342
30-34	11.673	11.030	22.703
35-39	11.880	11.524	23.404
40-44	12.655	11.900	24.555
45-49	10.893	10.094	20.987
50-54	9.478	8.291	17.769
55-59	6.176	5.716	11.892
60-64	4.321	4.372	8.693
65+	8.205	8.352	16.557
Luwu Timur	161.542	151.862	313.404

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Semester II Tahun 2023

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah adalah kapasitas atau kemungkinan suatu wilayah untuk berkembang dalam berbagai aspek yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Kabupaten Luwu Timur mengarahkan pengembangan wilayahnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari tiga dimensi utama yaitu daerah pantai, dataran dan berbukit. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk dijadikan



pengembangan di masa yang akan datang, secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi pengembangan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi dan jagung.

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dikembangkan seluas 28.865,26 Ha, meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan pembagian luasan untuk setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

NO	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3.908,93	13,54
2	Kecamatan Burau	3.436,17	11,90
3	Kecamatan Kalaena	3.074,15	10,65
4	Kecamatan Malili	1.045,20	3,62
5	Kecamatan Mangkutana	2.365,74	8,20
6	Kecamatan Nuha	79,96	0,28
7	Kecamatan Tomoni	1.654,46	5,73
8	Kecamatan Tomoni Timur	2.837,53	9,83
9	Kecamatan Towuti	4.842,63	16,78



10	Kecamatan Wasuponda	1.318,72	4,57
11	Kecamatan Wotu	4.301,76	14,90
JUMLAH		28.865.26	100,00

Sumber; Dokumen Matak Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten. Adapun rencana pengembangan KP2B di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada serta pembukaan sawah baru. Luas lahan yang akan dikembangkan untuk KP2B di Kabupaten Luwu Timur kurang lebih seluas 25.233,88 hektar. Sedangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kurang lebih seluas 3.454,22 hektar.

b. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pengembangan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, serta mengembangkan kawasan sentra produksi perkebunan.

Secara khusus pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk:

1. Mendorong pengembangan perekonomian masyarakat;



2. Merehabilitasi ruang pasca tambang; dan
3. Menyediakan bahan baku untuk industri.

Berdasarkan komoditas yang sudah berkembang dan kesesuaian lahan untuk pengembangan perkebunan serta potensi pasar terhadap hasil perkebunan maka komoditas tanaman perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur meliputi perkebunan sawit, perkebunan kelapa, dan perkebunan lada.

Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur meliputi areal seluas kurang lebih 51.269,07 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Prioritas pengembangan kawasan perkebunan di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

NO	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	5.833,86	11,38
2	Kecamatan Burau	9.632,44	18,79
3	Kecamatan Kalaena	2.329,28	4,54
4	Kecamatan Malili	2.982,77	5,82
5	Kecamatan Mangkutana	4.249,79	8,29
6	Kecamatan Nuha	1.968,39	3,84
7	Kecamatan Tomoni	4.574,23	8,92
8	Kecamatan Tomoni Timur	953,34	1,86
9	Kecamatan Towuti	8.942,00	17,44
10	Kecamatan Wasuponda	7.727,25	15,07



11	Kecamatan Wotu	2.075,72	4,05
JUMLAH		51.269,07	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

c. Kawasan Hortikultura

Pertanian hortikultura yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas dan kacang-kacangan. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta di lapangan. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 14.346,07 Ha dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur

NO	Kawasan Holtikultura	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	1,423.99	9.93
2	Kecamatan Burau	132.85	0.93
3	Kecamatan Kalaena	316.46	2.21
4	Kecamatan Malili	1,745.06	12.16
5	Kecamatan Mangkutana	4,927.19	34.35
6	Kecamatan Nuha	3.01	0.02
7	Kecamatan Tomoni	615.61	4.29
8	Kecamatan Tomoni Timur	48.35	0.34
9	Kecamatan Towuti	2,901.10	20.22
10	Kecamatan Wasuponda	413.38	2.88
11	Kecamatan Wotu	1,819.07	12.68



JUMLAH	14,346.07	100,00
---------------	------------------	---------------

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

2. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan di Kabupaten Luwu Timur berupa kawasan perikanan budidaya (tambak/air tawar) dan kawasan pengembangan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap

Pengolahan ikan atau industri perikanan terhadap hasil tangkapan ikan masih belum berkembang di Kabupaten Luwu Timur. Mengingat potensi perikanan tangkap yang sangat besar (terutama laut), serta perlunya transformasi struktur ekonomi masyarakat yang berbasis non lahan, maka usaha pengolahan ikan merupakan salah satu tumpuan peningkatan perekonomian masyarakat terutama di kawasan pesisir Kabupaten Luwu Timur. Kawasan perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada wilayah pesisir yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili sedangkan untuk perairan Danau meliputi Kecamatan Towuti dan Nuha.

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya darat di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 13.384,77 Ha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2.7

Kawasan Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur

NO	Kawasan Perikanan Budidaya	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3,258.39	24.34



2	Kecamatan Burau	465.40	3.48
3	Kecamatan Malili	6,244.15	46.65
4	Kecamatan Wotu	3,416.83	25.53
JUMLAH		13,384.77	100,00

Sumber; Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042, Tahun 2022

c. Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan

Arah jangka panjang pengembangan PPI/TPI Malili akan didorong sebagai embrio untuk pengembangan kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap dan budidaya. Dengan demikian, untuk mengembangkan Kecamatan Malili, Wotu, Angkona, dan Burau sebagai kawasan minapolitan berbasis ikan tangkap, maka akan dikembangkan fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana produksi, pengolahan, pemasaran, kelembagaan usaha, serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan.

Untuk memaksimalkan hasil pemasaran hasil perikanan tangkapan, Arahan pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PPI/TPI) di Kecamatan Malili dan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) di Kecamatan Wotu perlu untuk diperhatikan.

3. Kawasan pertambangan

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi kandungan mineral logam dan bukan logam (batuan). Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pertambangan mineral yang tersebar di setiap kecamatan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan di Kabupaten. Kegiatan pertambangan dilakukan pada lahan yang



diindikasikan memiliki kandungan potensi tambang kecuali di dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai:

- kawasan hutan lindung dan kawasan lindung di laut.
- kawasan lindung yang diindikasikan dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya.
- kawasan cagar budaya.
- kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- kawasan budidaya permukiman sudah terbangun.

a. Potensi Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Adapun wilayah pengembangan kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 325.717,83 Ha atau 46,67 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

b. Kawasan Pertambangan Batuan

Adapun wilayah pertambangan mineral dengan potensi mineral bukan logam/batuan dengan luas 4.609,57 hektare atau 0,66 % dari luas Kabupaten Luwu Timur.

4. Kawasan industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur diintegrasikan dengan rencana pengembangan pelabuhan serta mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur meliputi kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah.

Rencana kawasan industri Lampia di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur merupakan kawasan industri yang memiliki luas yang sudah dibebaskan mencapai 509,53 hektare. Kawasan Industri Lampia



merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan industri pengolahan dan manufaktur. Kawasan industri di Kecamatan Nuha mencapai 108,96 hektare dan Kawasan Industri Tomoni di Kecamatan Tomoni mencapai 212,57 hektare dengan fungsi ruang sebagai industri pengolahan hasil pertanian skala menengah dan besar.

5. Kawasan pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

- Keindahan alam dan keindahan panorama.
- Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
- Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
- Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 2 (dua) Pengembangan Kawasan Wisata, yaitu:

a. Kawasan Wisata Danau

memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam, wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori Global Ecoregions. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-kupu dan Pantai Salonsa.

b. Kawasan Wisata Alam dan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut



memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran potensi wisata alam dan wisata bahari di Kecamatan Malili Pulau Bulupoloe, Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Tomoni.

Tabel 2.8
Lokasi Objek Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
Objek Wisata Alam		
1	Danau Matano	Desa Matano Kec. Nuha
2	Cagar Alam Perburuan	Desa Matano Kec. Nuha
3	Mata Air Matano (Bura-Bura)	Desa Matano Kec. Nuha
4	Pantai Ide	Desa Magani Kec. Nuha
5	Pantai Pomua Dahu-Solonsa	Desa Magani Kec. Nuha
6	Bumi Perkemahan Sawerigading	Desa Magani Kec. Nuha
7	Pantai Kupu-Kupu-Tapu Singkole	Desa Magani Kec. Nuha
8	Pantai Molino Topundau	Desa Magani Kec. Nuha
9	Pantai Impian-Old Camp	Desa Sorowako Kec. Nuha
10	Danau Towuti	Desa Timampu Kec. Towuti
11	Danau Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
12	Danau Tapparang Masapi	Desa Mahalona Kec. Towuti
13	Air Terjun Mata Buntu	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
14	Kali Dingin (Wasuponda)	Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda



15	Air Terjun Atue	Desa Atue Kec. Malil
16	Sungai Malili	Desa Malili Kec. Malili
17	Hutan Mangrove	Kec. Malili/Wotu/Burau
18	Sumur Sawerigading	Desa Baruga Kec. Malil
19	Permandian Alam Mantadulu	Desa Mantadulu Kec. Angkona
20	Air Terjun Tokio	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
21	Sungai Uelanti	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
22	Permandian Lopi	Desa Margolembo Kec. Mangkutana
23	Air Terjun Saloanuang	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
24	Banua Pangka	Desa Bawalipu Kec. Wotu
25	Gua Batu Putih	Desa Batu Putih Kec. Burau
26	Permandian Air Panas	Desa Cendana Kec. Burau
27	Air Terjun Bonepute	Desa Bonepute, Kec. Burau
28	Batu Papan	Desa Rantemario, Kec. Tomoni
29	Air Terjun Tompotikka	Desa Ussu, Kec. Malili
Objek Wisata Sejarah		
1	Makam Mokole Lakamandiu	Desa Matano Kec. Nuha
2	Makam Puang Sanro	Desa Lampenai Kec. Wotu
3	Kuburan Tua	Desa Mabonta Kec. Burau
Objek Wisata Buatan		
1	Bukit Agro (Tabarano)	Desa Tabarano Kec. Wasupona
2	Semoga Lestari Water Park	Desa Lestari, Kec. Tomon

Sumber: RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



6. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana.
- b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan.
- c. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Tujuan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan pengembangan perumahan dimasa yang akan datang sesuai dengan jumlah penduduk yang akan di tempung sampai dengan akhir tahun perencanaan.
- b. Mendistribusikan perkembangan wilayah melalui pengembangan kawasan-kawasan permukiman yang didukung oleh infra struktur yan memadai.
- c. Menciptakan generator pertumbuhan yang baru pada kawasan kawasanyang akan di dorong sebagai kawasan permukiman.

2.1.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan



selain itu dapat mengatasi permasalahan pengangguran. Salah satu sasaran utama pembangunan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja setiap tahun.

Salah satu isu penting dalam struktur ketenagakerjaan, adalah pengangguran. Pengangguran memerlukan perhatian serius berbagai pihak, baik Pemerintah, swasta maupun pemangku kepentingan lainnya. Upaya dalam mengatasi pengurangan tingkat pengangguran khususnya, dan pemantauan situasi ketenagakerjaan yang lebih baik pada umumnya, maka data pengangguran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Konsep yang digunakan adalah konsep *Pengangguran Terbuka* yaitu : (i) mereka yang sedang mencari pekerjaan, (ii) mereka yang sedang mempersiapkan usaha baru, (iii) mereka tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan (putus asa), dan atau (iv) mereka sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja yang berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja.

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun keatas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke Angkatan kerja dan pasar kerja. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 94,58% persen atau 157.300 orang merupakan Angkatan kerja, terdiri dari 148.779 orang penduduk bekerja dan 8.521 orang pengangguran. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel. 2.9



Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/Economically Active	98.330	58.970	157.300
1. Bekerja/ <i>Working</i>	93.526	55.253	148.779
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	4.804	3.717	8.521
Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	18.040	51.795	69.835
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	8.813	9.853	18.666
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	3.254	39.777	43.031
3. Lainnya/ <i>Others</i>	5.973	2.165	8.138
Jumlah/Total	116.370	110.765	227.135

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023

Tabel. 2.10

Presenatase Jumlah Penduduk menurut angkatan kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Kegiatan Utama	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	212,900	217.684	221.749	225.805	227.135
Angkatan Kerja :	143.7	157.5	162.182	161.470	157.300
- Bekerja	138.2	150.5	154.130	154.240	148.779
- Pengangguran Terbuka	5.500	7.029	8.052	7.230	8.521
Bukan Angkatan Kerja	69,300	60.175	59.567	64.335	69.835
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK(%)	67,48	72,36	73,14	71,51	94,58

Sumber : Kab. Luwu Timur dalam angka 2023, BPS Luwu Timur

Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2023 meningkat yakni sebanyak 227.135 Jiwa jika di dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 yaitu 225.805 jiwa dengan selisih 1.330 jiwa . Angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 157.300 orang dibandingkan Agustus 2022 yaitu 161.470 Jiwa. Pada Agustus 2023 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat menjadi 94,58 persen dibandingkan



Agustus 2022 yaitu 71,51 persen. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Kenaikan ini berbanding terbalik jika melihat perubahan yang terjadi antara tahun 2021 sampai 2022, dimana terjadi penurunan TPAK sebesar 1,65 persen.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator yang juga cukup mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dalam setahun terakhir (2023) pengangguran meningkat yaitu sebanyak 8.521 jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yaitu sebanyak 7.230 jiwa, jumlah kenaikan penduduk pada Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022-2023 yaitu 1.291 jiwa, sedangkan pada tahun 2021-2022 yaitu sebanyak 822 jiwa. Bahkan juga jumlah Angkatan kerja di tahun 2023 malah menurun dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, belum dapat diimbangi oleh lapangan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis untuk memberi peluang lebih besar kepada masyarakat memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Setiap daerah memiliki persoalan yang sama terkait dengan pengangguran terbuka. Seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, pengangguran terbuka tidak bisa dihilangkan.

2.2. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB



atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Oleh karena itu maka diperlukan data-data dan informasi di masa yang telah lalu untuk mendapatkan gambaran pada masa lalu dan masa kini, serta untuk menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi



regional Kabupaten Luwu Timur. Selama lima tahun terakhir PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019, adalah sebesar 20.996,75 (Juta rupiah) kemudian naik hingga mencapai 21.529,81 (Juta rupiah), pada tahun 2020. selanjutnya PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Dimana pada tahun 2021 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur sebesar 23.614.52 (Juta rupiah), dan terus meningkat secara fluktuatif pada tahun 2022 menjadi 28.407,91 (Juta rupiah), dan pada tahun 2023 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga berlaku sebesar 30.695,94. Demikian halnya dengan PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan (ADHK) selama lima tahun terakhir terus meningkat. pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 16.022,94 (Juta Rupiah) kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 16.256,90 (Juta Rupiah). Namun, pada tahun 2021 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan sebesar 16.030,50 (Juta rupiah), kemudian Kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 16.349,57 (Juta rupiah) dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 17.928,42 (Juta rupiah).

Tabel. 2.11
 Produk Domestik Reginal Bruto
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2023

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
-1	-2	-3
2019	20.996,75	16.022,94
2020	21.529,81	16.256,90
2021	23.614.52	16.030,50
2022	28.407,91	16.349,57
2023	30.695,94	17.928,42



Sumber : kabupaten Luwu Timur Dalam Angka, 2023

Jika dilihat per sektor, seperti yang nampak pada Tabel dibawah, sektor *Pertambangan dan Penggalian* masih menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai sektor ini didominasi sub sektor *Pertambangan Biji Logam (Nikel)*.

Kontribusi yang diberikan oleh sektor *Pertambangan dan Penggalian* atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 15 441 184,81 (Juta rupiah). Sedangkan atas dasar harga konstan sektor ini mampu memberikan kontribusinya sebesar 9 395 080,90 (Juta rupiah).

Tabel. 2.12
PDRB Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Lapangan Usaha/ Industri	PDRB (Juta Rupiah)	
	ADHK	ADHB
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 293 120,37	6 799 931,86
B. Pertambangan dan Penggalian	9 395 080,90	15 441 184,81
C. Industri Pengolahan	566 915,84	952 050,41
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12 487,80	13 156,46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 650,74	2 118,40
F. Konstruksi	1 697 119,38	3 017 089,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	793 341,40	1 162 104,11
H. Transportasi dan Pergudangan	119 466,26	221 513,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28 390,33	50 149,51
J. Informasi dan Komunikasi	364 590,03	405 516,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	164 947,67	274 705,25
L. Real Estate	354 143,00	611 984,84
M,N. Jasa Perusahaan	8 342,43	14 461,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	406 178,46	696 137,11
P. Jasa Pendidikan	396 816,11	588 163,62



Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	306 207,36	414 324,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	19 631,47	31 356,57
PDRB	17 928 429,56	30 695 948,43
sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2023		

Kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan adalah sektor *Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang*. Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2023 sektor ini hanya mampu memberikan sumbangannya sekitar 2 118,40 (juta rupiah), sedangkan atas dasar harga konstan kontribusi yang diberikan hanya sekitar 1 650,74 (juta rupiah) terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur.

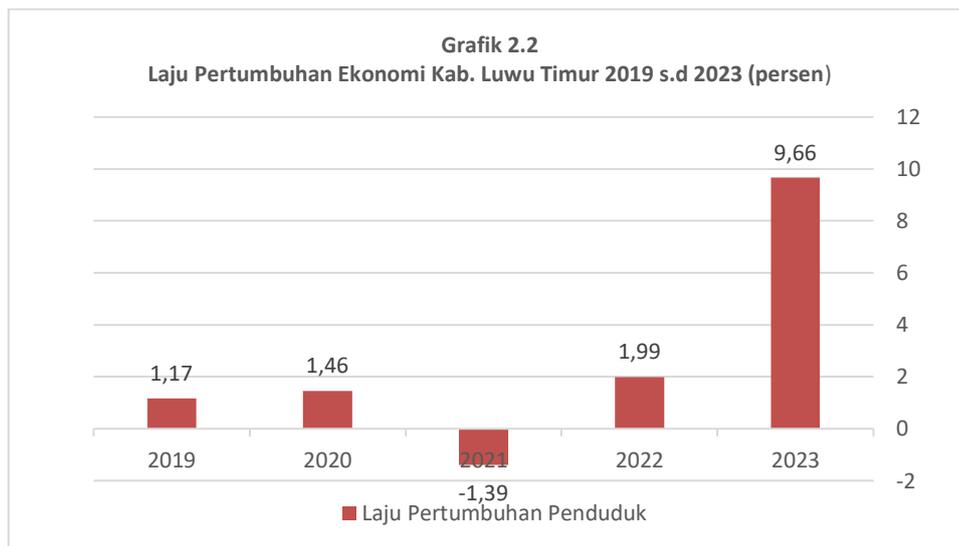
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pada 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17%, kemudian Pada tahun 2020, pertumbuhannya meningkat sebesar 1,46%, kemudian pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya produksi nikel dalam matte dan menurunnya harga realisasi rata-rata nikel di pasar dunia yaitu sebesar 1,39%, Namun Pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kembali mengalami Peningkatan yaitu 1,99% dan pada tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur sangat meningkat



pesat dengan besaran 9,66%. Selisih kenaikan pertumbuhan penduduk dari tahun 2022-2023 yaitu sebesar 7,67%. Tentu saja peranan Pertambangan dan Penggalian adalah meningkatnya produksi pada lapangan usaha tersebut. signifikan kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab naiknya peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2019-2023 (Data diolah)

Grafik. 2.3
Nilai PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2024 (data diolah)

Berdasarkan harga konstan 2019, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas



dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2023, mencapai 17,928,42 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 16,022,95 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 8,49 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 9,66 persen.

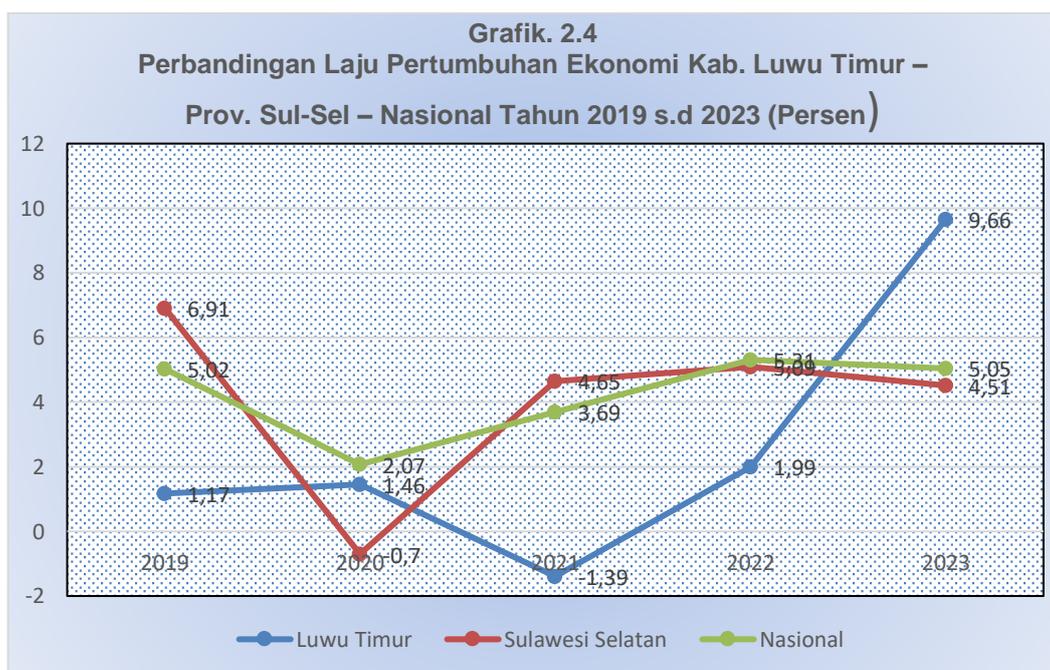
Tabel 2.13
Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (persen),
Tahun 2020–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022*	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	-1,78	4,02	3,67	3,68
Bulukumba	0,43	4,76	3,81	4,11
Bantaeng	0,52	8,86	15,45	5,56
Jeneponto	0,16	5,40	3,81	1,90
Takalar	-0,61	5,05	4,64	3,86
Gowa	1,76	7,26	4,59	5,82
Sinjai	1,55	5,23	4,87	5,71
Maros	-10,87	1,36	9,13	5,00
Pangkep	-1,69	3,46	4,93	4,75
Barru	0,87	4,77	5,11	3,51
Bone	-0,25	5,53	5,23	3,77
Soppeng	2,19	6,15	6,18	3,33
Wajo	-1,17	6,77	2,38	1,43
Sidrap	-0,59	5,54	4,86	3,28
Pinrang	0,44	5,04	4,53	2,18
Enrekang	1,25	6,36	3,71	2,33
Luwu	1,30	6,03	5,69	5,64
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66
Luwu Utara	-0,59	3,90	4,54	5,12
Luwu Timur	1,46	-1,39	1,99	9,66
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94
Makassar	-1,27	4,47	5,40	5,31
Pare-pare	-0,08	4,41	5,93	3,88
Palopo	0,45	5,41	5,83	4,34

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, 2023



Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yaitu Luwu utara, Palopo dan Luwu, terlihat Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami perlambatan dibanding Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Hal ini disebabkan karena dominasi Sub Kategori Pertambangan Biji Logam yang dalam hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya harga nikel di pasar dunia dan produksi nikel dari PT. Vale Indonesia,Tbk. perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur. Namun pada Tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur meningkat pesat yaitu sebesar 9,66 persen dan tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian meningkat sebesar 23,57 persen dari tahun sebelumnya 2018 yakni sebesar 69,41 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, BPS Prov.Sulawesi Selatan, BPS RI

2.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.



Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi, di lain pihak inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat menghasilkan perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa secara umum pada periode tertentu di suatu wilayah.

Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya :

- a. Konsumsi masyarakat meningkat
- b. Berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi
- c. Tidak lancarnya distribusi barang

Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan data tersebut, BPS melalui kegiatan Survei Harga Konsumen (SHK) berusaha mengumpulkan data harga beberapa barang dan jasa dalam suatu paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat saat ini. Selanjutnya, kegiatan SHK akan menghasilkan data statistik harga yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan penyusun Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang mampu memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu inilah yang kemudian disebut dengan inflasi (tingkat kenaikan) atau deflasi (tingkat penurunan) harga dari barang/jasa (paket komoditas) yang secara umum dikonsumsi masyarakat. Kenaikan atau penurunan harga barang atau jasa erat kaitannya dengan kemampuan daya beli masyarakat. Semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka semakin rendah



daya belinya dan begitu pula sebaliknya. Selain bersumber dari kegiatan SHK, bahan penyusun IHK lainnya juga diperoleh dari hasil kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH) yang berupa diagram timbang. Diagram timbang mencerminkan pola konsumsi masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa dalam sebuah paket komoditas yang sama dengan paket komoditas SHK. Tidak seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melaksanakan SBH, sehingga Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Palopo yang dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar.



Sumber: BPS Kota Palopo, Tahun 2023 (Data diolah)

Pada tahun 2023 tercatat bahwa di Kabupaten/Kota Palopo terjadi penurunan inflasi sebesar 2,21 persen yang Dimana tahun sebelumnya (2022) sebesar 5,13 persen dan menjadi tahun inflasi yang tertinggi Jika dilihat perkembangannya selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Inflasi Kota Palopo mengalami fluktuasi namun kecenderungannya mengalami peningkatan.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga



dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan perbandingan dengan wilayah lainnya. IPM juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif.

Untuk mengukur ketiga dimensi pembangunan yang disebutkan di atas dibentuk suatu ukuran berupa indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan berdasar pada 3 indikator yaitu :

- Angka Harapan Hidup yang mengukur hidup sehat dan umur panjang,
- Pendidikan yang terdiri dari : Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang mengukur tingkat pengetahuan, dan
- Purchasing Power Parity (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.



SumberData: BadanPusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2022(Data diolah)



Gambar di atas menunjukkan perkembangan IPM Luwu Timur yang cukup memadai dibanding dengan perkembangan IPM Regional Sulawesi Selatan dan Nasional. Pada 2019, Luwu Timur mencapai 72,80, sementara Sulawesi Selatan pada angka 71,66 dan nasional 71,92. Kemudian pada 2020, Luwu Timur mencapai 73,22, sedangkan Sulawesi Selatan 71,93 dan nasional 71,94. Selanjutnya pada 2021, Luwu Timur sebesar 73,34, sedang Sulawesi Selatan 72,24 dan nasional sebesar 72,29. Berikut pada 2022, Luwu Timur mencatat 73,92 sedang Sulawesi Selatan 72,82 dan nasional 72,91. Terakhir pada 2023, IPM Luwu Timur sebesar 75,84, sedang Sulawesi Selatan sebesar 74,60 dan nasional 74,39.

Tabel. 2.14
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2018- 2022

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70.03	70.38	70.53	70,63	70,94
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.81	12.82	12.83	12,84	13,00
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.45	8.54	8.80	8,81	8,92
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	12,346	12,802	12,814	12.886	13.058
IPM		72.16	72.80	73.22	73,34	73,92

Sumber data :Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2023

Data tersebut di atas menunjukkan jika keseluruhan komponen dari IPM di Luwu Timur periode 2018–2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi bagi peningkatan IPM tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab secara sinergis dan terintegrasi.

2.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah menerima dan menyerap berbagai konsep dan informasi pembangunan. Pelayanan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperhatikan pembiayaan pendidikan dengan upaya mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Perhatian ini merupakan salah satu prioritas belanja pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya peningkatan kualitas, membangun keunggulan dan daya saing serta upaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Program prioritas daerah untuk bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026 dan RKPD Tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan Aspek Kesejahteraan pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk urusan Pendidikan adalah Program Wajib Belajar 9 Tahun yang didukung kebijakan pendidikan gratis dengan sasaran indikatornya, Angka Rata-



Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) tahun 2022.

2.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK menurut jenjang pendidikan di Kab. Luwu Timur memperlihatkan tendensi yang makin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diduduki. APK Murid SD/Sederajat melebihi dari angka seratus persen, hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat yang berumur di bawah 7 tahun dan atau di atas 12 tahun.

Tabel. 2.15
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2018 - 2022
Kabupaten Luwu Timur

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SD/MI	36.269	33.998	36.745		36.990
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	35.473	35.473	35.631		35.899
1.3	APK SD/MI	102,24	102,94	103.13	99.41	103.04
2	SMP/MTS					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah dijenjang SMP/MTs	16.843	16.846	16.995		16.686



2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16.276	16.276	16.411		18.492
2.3	APK SMP/MTs	103,49	103,50	103.56	97,37	90,23

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Tabel. 2.16
Angka Partisipasi Kasar 2022 menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah siswa SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APK
1	Burau	4.275	4.114	103,91%	2.553	2.233	114,33
2	Wotu	3.572	3.861	92,51%	1.726	2.031	84,98
3	Tomoni	3.744	3.116	120,15%	1.356	1.605	84,49
4	Tomoni Timur	1.534	1.455	105,43%	827	755	109,54
5	Angkona	2.958	2.888	102,42	1.421	1.545	91,97
6	Malili	5.710	5.714	99,93	2.184	2.755	79,27
7	Towuti	6.214	5.829	106,60	2.207	2.783	79,30
8	Nuha	2.913	2.761	105,51	1.307	1.353	96,60
9	Wasuponda	2.507	2.657	94,35	1.224	1.460	83,84
10	Mangkutana	2.295	2.308	99,44	1.281	1.286	99,61
11	Kalaena	1.268	1.196	106,02	600	686	87,46
	Jumlah	36.990	35.899	103,04%	16.686	18.492	90,23

Sumber : Dinas Pendidikan kab. Luwu Timur Tahun 2023

2.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena



APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel. 2.17

Angka Partisipasi Murni Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Luwu Timur

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	92,03	92.39	92.54	93,07	99,65
2	SMP/MTs	95,73	95.97	95.99	85,13	89,64

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 99.65%, Realisasi tersebut diperoleh dari data Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 35.774 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 35.899 jiwa sehingga terealisasi sebesar 99,65 %. Jika dibanding dengan tahun 2021 realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 93,07%, maka terjadi peningkatan sebesar 6,58% pada tahun 2022. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 Kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan Dasar sembilan tahun dengan kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts Pada tahun 2020 menargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 89,64%, Realisasi diperoleh dari data Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Pkt.B sebanyak 16.576 siswa dibanding dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak



18.492 jiwa sehingga terealisasi sebesar 89,64%. Jika dibanding dengan tahun 2022 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts terjadi peningkatan sebesar 4.51% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Luwu Timur dan ingin kerja. Indikator sasaran ini dilaksanakan melalui 1 Program dan 1 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Pendidikan dasar sembilan tahun. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran ini adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah menengah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang sesuai di suatu daerah. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

2.6 Kesehatan

Untuk meningkatkan pembangunan manusia dimasa mendatang dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas di bidang kesehatan diantaranya melalui pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi terutama balita dan peningkatan peran serta masyarakat. Pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya

1. Penambahan sarana pelayanan kesehatan
2. Penambahan tenaga medis dan paramedis serta
3. Penyediaan obat-obatan yang harganya dapat terjangkau oleh masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran “ **Indonesia Sehat**” diperlukan program kesehatan yang terpadu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu melakukan berbagai program *Promotif*, *Preventif* maupun *Kuratif* antara lain melalui pendidikan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan pelayanan kesehatan.

2.6.1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup



Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel. 2.18
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	42	45	45	52	54
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.724	5.607	5518	5.439	5.251
3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,34	8,03	8,16	9,56	10,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat. Kematian bayi terbanyak pada kelompok bayi baru lahir 0-28 hari (neonatal) sebanyak 36 kasus, dimana penyebab kematian terbanyak adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah yaitu kurang 2500 Gram), *Asfiksia*, dan adanya kelainan bawaan lahir. Sedangkan untuk post neonatal (29 hari – 1 bln) sebanyak 14 kasus dan penyebab kematian terbanyak adalah kelainan saluran cerna, kelainan jantung, dan kelainan bawaan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yaitu 10,24 per 1000KH, angka ini sudah dibawah target Nasional Tahun 2022 yaitu 20,6 per 1000KH. Meskipun angka tersebut dibawah target nasional tetapi tetap harus dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Luwu Timur.

2.6.2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi cenderung menurun, hal ini berbanding terbalik dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Jika angka kematian bayi tinggi berarti angka kelangsungan hidup bayi rendah. Untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi dapat dilakukan dengan menurunkan angka kematian bayi.

Tabel. 2.19
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kabupaten Luwu Timur 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka kelangsungan hidup bayi	92.67	91.98	91.85	90,44	89,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

2.6.3 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup



Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel. 2.20
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Balita	Kasus	8	5	4	2	8
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.724	5.607	5518	5.439	5.251
3	Angka Kematian Balita 1000 kelahiran hidup	Angka	1,40	0,89	0,72	0,37	1,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat di simpulkan jumlah kematian Balita di Tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Dan penyebab kematian balita yaitu, balita



mengalami penyakit komplikasi seperti cerebral palsy, kelainan jantung bawaan, hydrocephalus dan ada karena kecelakaan yaitu tenggelam.

2.6.4 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian neonatal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun meskipun pada tahun 2019 meningkat namun pada tahun 2020 kembali menurun yaitu 4,61 per 1000 KH, angka tersebut dibawah target Nasional. Angka Kematian Neonatal Per 1000 kelahiran hidup sebagai berikut:

Tabel. 2.21

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kematian Neonatal	Kasus	29	34	32	40	40
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.724	5.607	5.518	5.439	5.251
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	5,07	6,06	4,61	0,37	1,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kematian neonatal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat, angka tersebut dibawah target Nasional. Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah BBLR (Berat Badan lahir rendah yaitu kurang 2500 Gram), Asfiksia, dan adanya kelainan bawaan lahir. Bayi dengan BBLR terlahir dari ibu yang dimasa kehamilannya mengalami Kurang Energi Kronik (KEK), kehamilan yang tidak diinginkan dan kehamilan dari pernikahan dini.

2.6.5 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel. 2.22

Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup



Kab. Luwu Timur Tahun 2018-2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	5	8	6	8	7
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Orang	5.724	5.607	5.518	5.439	5.251
3	Angka Kematian Ibu	Angka	87,35	142,67	108,74	147,09	133,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat meskipun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 133,3 per 100.000KH dengan 7 kasus kematian. Angka tersebut masih dibawah target Nasional tahun 2022 yaitu 230 per 100.000 KH. Penyebab kematian ibu terdiri atas penyebab langsung dan tidak langsung. Untuk penyebab langsung paling banyak disebabkan karena perdarahan dan eklampsi. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada kematian ibu yaitu

- Faktor geografis (jarak rumah ke tempat rujukan),
- Faktor psikis ibu dengan adanya komorbid (penyakit penyerta pada ibu yang dapat memperparah keadaan ibu jika mengalami komplikasi),
- Faktor 4T pada ibu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu rapat jarak kehamilan, dan terlalu sering melahirkan) dan 3 Terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ditempat rujukan, dan terlambat mendapat penanganan).



BAB III

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Profil Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks dan multi dimensional yang tak terpisahkan dari pembangunan dan mekanisme ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif di Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan mempertimbangkan empat strategi utama yaitu:

1. Mengurangi beban masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat Miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Mengacu pada empat strategia diatas yang dijalankan oleh Pemerintah daerah terkait dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi:

1. Mengurangi beban pengeluaran warga antara lain yaitu memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah Kabupaten, bantuan rumah bagi warga yang berpenghasilan rendah pendampingan pasien operasi katarak di rumah sakit.



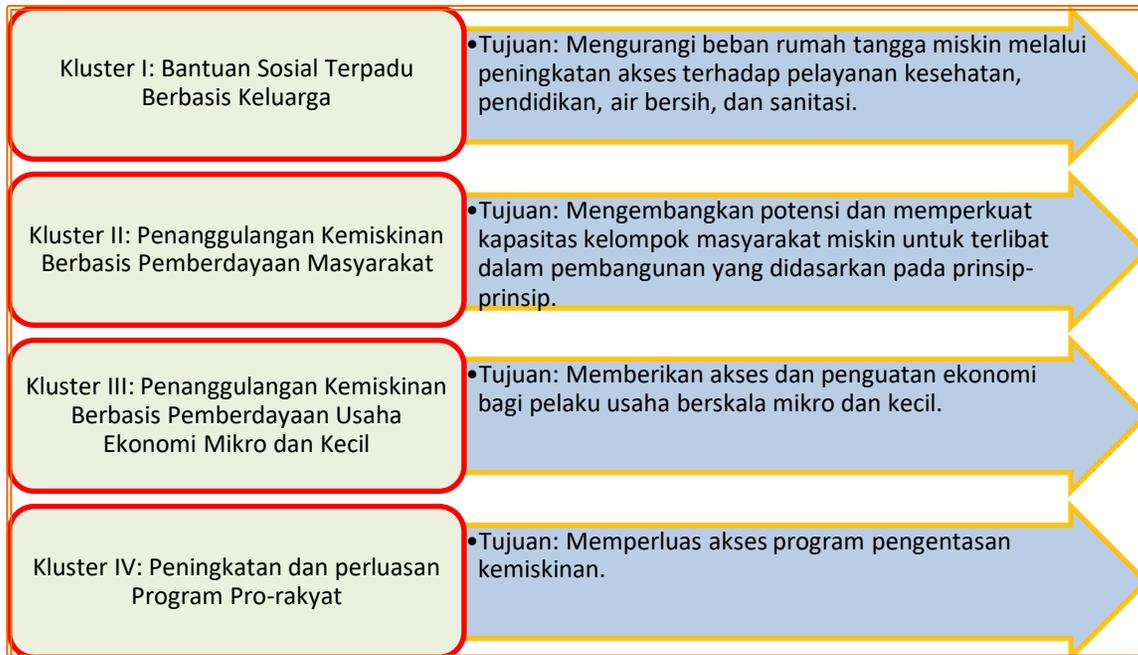
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat Miskin : Bantuan pupuk para petani, bantuan KUBE bagi keluarga miskin, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan Kecil antara lain : Program pengembangan Industri kreatif, pengembangan industry agro serta sertifikasi produk industri
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara lain mensinegrikan kebijakan dan program penaggulangan kemiskinan tingkat Kabupaten dan Propinsi melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) serta melakukan Verifikasi dan Validasi data fakir miskin.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 merupakan upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan beberapa program pengentasan kemiskinan. Sejak Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan hingga saat ini, setidaknya ada empat instrumen utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang dibagi ke dalam empat kluster. Setiap kluster memiliki tujuan dan target masing-masing dan berisi beragam program.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 merupakan upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan beberapa program pengentasan kemiskinan. Sejak Peraturan Presiden tersebut dikeluarkan hingga saat ini, setidaknya ada empat instrumen utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang dibagi ke dalam empat kluster. Setiap kluster memiliki tujuan dan target masing-masing dan berisi beragam program.



Gambar. 3.1
Instrumen Utama Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia



Sumber: TNP2K

Dari hasil tabel diatas ada empat Instrumen Utama Penanggulangan kemiskinan yang memiliki tujuan dan target yang masing-masing berisi program sebagai berikut :

- a. Kluster I pada pemberian pelayanan dasar dan infrastruktur primer kepada rumah tangga/keluarga miskin. Kluster I terdiri dari lima program pengentasan kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN).
- b. Kluster II berisi enam program pengentasan kemiskinan berbasis kelompok /komunitas, yaitu Program Nasional Penyediaan air minum dan sanitasi



berbasis Masyarakat (PANSIMAS), Infrastruktur air bersih, Perluasan Lapangan Kerja, dan Dana Desa.

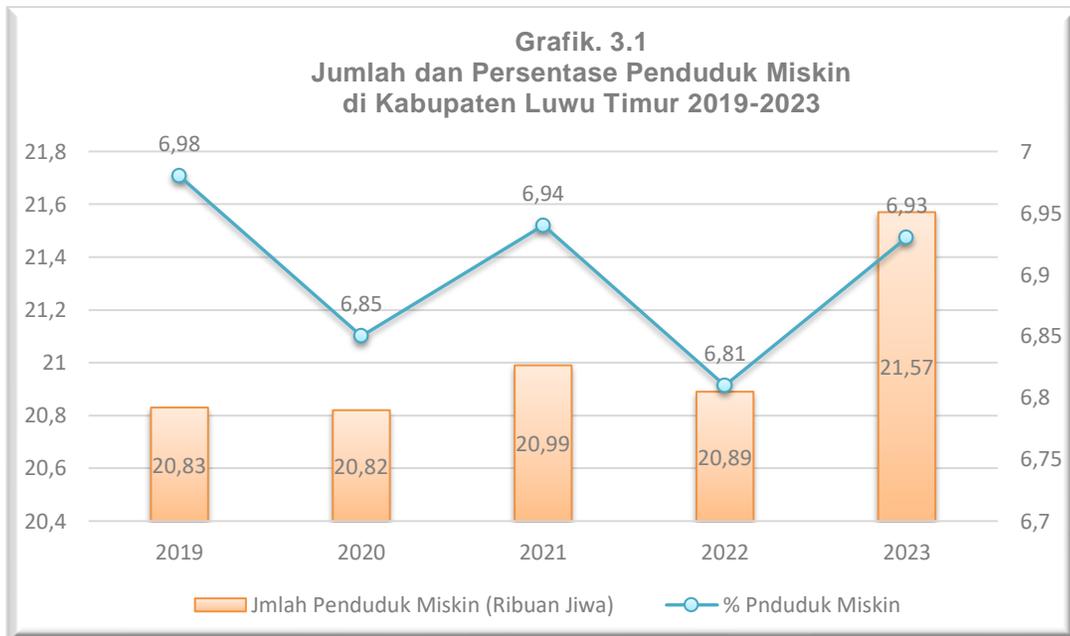
- c. Kluster III bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Kluster III terdiri atas dua program utama, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUR merupakan Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sedangkan KUBE bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- d. Kluster IV dimaksudkan untuk memperluas akses program pengentasan kemiskinan yang lebih bersifat pro-rakyat. diantaranya program listrik murah dan program rumah murah yang diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Program semacam ini hanya untuk mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan meningkatkan status rumah menjadi lebih baik.

Pengentasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai ke akar masalah dalam pembangunan manusia secara menyeluruh akan tercapai. dari empat Instrumen Utama dalam Indikator kesejahteraan selain yang telah diuraikan tentang gambaran kemiskinan yang diukur dari tingkat pendapatan yang diterima.



3.1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2023 sebesar 21,57 ribu jiwa atau 6,93 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,68 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2022, atau Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 6,93 persen naik sebesar 0,12 persen poin dari maret 2022. Jika melihat perkembangan selama lima tahun terakhir, 2019-2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 20,83 ribu jiwa, lalu pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 20,82 ribu jiwa dan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 0,17 ribu jiwa menjadi 20,99 ribu jiwa dan Kembali turun pada tahun 2022 menjadi 20,89 ribu jiwa dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali meningkat yaitu sebanyak 21,57 ribu jiwa. Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yang juga bervariasi selama lima tahun terakhir. Pada,tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sebesar 6,98 persen terhadap total penduduk, kemudian mengalami penurunan tahun 2020 mencapai 6,85 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, persentase kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 6,94 persen lalu di tahun 2022 kembali turun menjadi 6,81 persen lalu kemudian kembali naik di angka 6,93 persen. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur terlihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

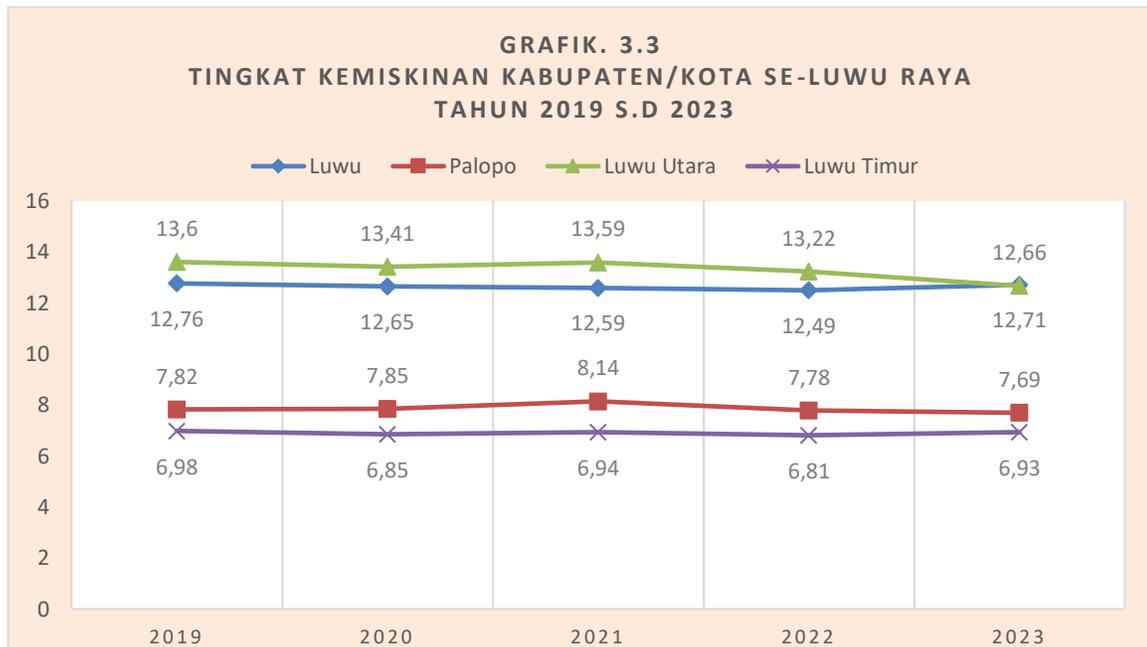
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Karena, Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Pada tahun 2019 Garis Kemiskinan sebesar 5,79 persen atau sebesar Rp 333.739,- perkapita/bulan. Selanjutnya di tahun 2020 Garis Kemiskinan menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 5,04 persen. Pada tahun 2021, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 371,947,-perkapita/bulan atau meningkat 6,10 persen. Pada tahun 2022, Garis Kemiskinan turun 5,97 persen menjadi Rp 394.158,- perkapita/bulan. Terakhir pada tahun 2023 mencapai Rp 438,178,- perkapita/bulan yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 3.2
Garis Kemiskinan Luwu Timur, 2017-2023



Sumber: Luwu Timur dalam Angka tahun 2024, BPS



Sumber: BPS Sulawesi Selatan.2024

Untuk Mengukur Kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dari Grafik diatas tergambar bahwa Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 merupakan yang terendah dibandingkan Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, walaupun dari jumlah penduduk miskin



masih berada diatas Kota Palopo. Hal yang sama juga tergambar pada tabel perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berada dibawah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Tabel. 3.1

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Org ,000) Kab. Luwu Timur
Prov. Sul-Se Nasional Tahun 2019 s.d 2023

Pemerintahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prov. Sulawesi Selatan	767,83	776,83	784,98	777,44	788,85
Nasioanal	25,144,72	26,424,02	27,542,77	26,161,16	25,900,00
Kab. Luwu Timur	20,83	20,82	20,99	20,89	21,57

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel, BPS Nasional, dan BPS Kab Luwu Timur, tahun 2024

Tabel. 3.2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, Maret 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persen (%)
1	Kepulauan Selayar	16.89	12,27
2	Bulukumba	30.65	7,22
3	Bantaeng	17.49	9,18
4	Jeneponto	48.32	13,06
5	Takalar	25.01	8,29
6	Gowa	59.10	7,42
7	Sinjai	21.14	8,55
8	Maros	34.96	9,65
9	Pangkep	46.06	13,40
10	Barru	14.88	8,46
11	Bone	80.12	10,53
12	Soppeng	17.21	7,48
13	Wajo	27.54	6,73
14	Sidrap	15.75	5,14
15	Pinrang	34.23	8,90
16	Enrekang	26.97	12,69
17	Luwu	47.67	12,71
18	Tana Toraja	30.23	12,48



19	Luwu Utara	40.79	12,66
20	Luwu Timur	21.57	6,93
21	Toraja Utara	29.14	12,12
22	Makassar	80.32	5,07
23	Pare Pare	7.98	5,34
24	Palopo	14.85	7,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan 2024

3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Keparahan Kemiskinan (P_2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Kabupaten Luwu Timur pada periode 2017 – 2022 cenderung berfluktuasi antar tahun. Pada tahun 2017-2020, indeks P_1 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,60 dan mengalami penurunan menjadi 1,05 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021, indeks P_1 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,09. Pada tahun 2022, indeks P_1 mengalami penurunan Kembali menjadi 0,8. Tahun 2022 merupakan indeks kedalaman paling rendah selama kurun waktu enam tahun terakhir. Dari perubahan indeks P_1 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode enam tahun terakhir terdapat pada tabel sebagai berikut :



Tabel. 3.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Kabupaten Luwu Timur, 2018 – 2023

Tahun	Indeks P_1	Indeks P_2
1	2	3
2018	1,16	0,28
2019	1,11	0,25
2020	1,05	0,24
2021	1,09	0,26
2022	0,80	0,16
2023	1,46	0,41

Sumber: Data BPS Prov. Sulawesi Selatan, 2024

Sejalan dengan indeks P_1 , Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Luwu Timur pada periode enam tahun terakhir juga berfluktuasi. Pada tahun 2018-2020 indeks P_2 di Kabupaten Luwu Timur sekitar 0,28 dan mengalami penurunan menjadi 0,24 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 indeks P_2 mengalami Kembali peningkatan menjadi 0,26 kemudian pada tahun 2022 indeks P_2 mengalami penurunan menjadi 0,16 dan Kembali naik yakni 0,41 Selama kurun waktu enam tahun, seperti halnya indeks P_1 , indeks keparahan paling kecil terjadi pada tahun 2022. Dari perubahan indeks P_2 ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur semakin naik selama periode enam tahun terakhir.

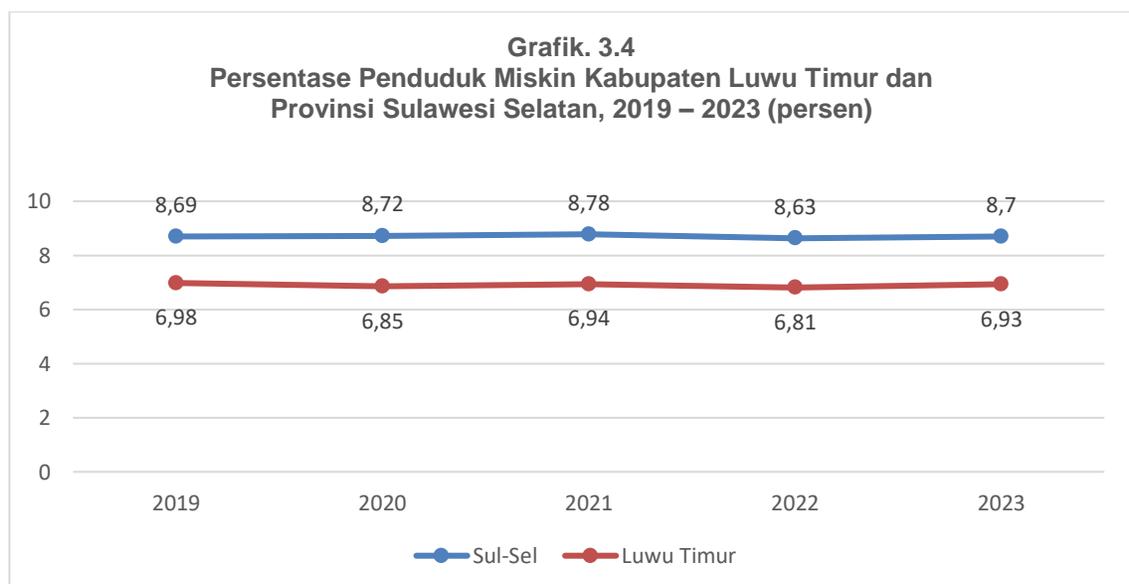
3.1.3. Perbandingan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan

Besarnya angka kemiskinan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan



rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai. Namun, jika melihat data dalam suatu daerah mengalami kenaikan angka kemiskinan bukan berarti daerah itu gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena tidak bekerja justru karena pemerintah benar-benar mendata hingga ke Tingkat desa secara *de facto*, sebab kemiskinan itu tidak diukur berdasarkan satu titik melainkan dengan periode waktu dan juga bukti yang konkret di Masyarakat.

Angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur sejak 2019 – 2023 bersifat Fluktuasi, dapat di Tarik dari jumlah rata-rata persentase kemiskinan dari 5 tahun terakhir yaitu 6,90 persen, sedangkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2019 -2023 juga bersifat Fluktuasi yaitu kadang naik maupun turun, yang Dimana rata-rata persentase kemiskinan dari 5 tahun terakhir yaitu 8,70 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Luwu Timur masih berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dari angka kemiskinan rata-rata.



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Sel 2024



Demikian juga Pencapaian dalam mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, yang terlihat dari pencapaian Indeks P_1 dan Indeks P_2 . Indeks P_1 Kabupaten Luwu Timur sekitar 1,46 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata indeks P_1 Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 1,57 pada tahun 2023. Namun, pada pencapaian indeks P_2 Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebesar 0,41 sama dengan indeks P_2 Provinsi Sulawesi Selatan yang sekitar 0,41 di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur sudah lebih baik, terutama dalam menekan jumlah penduduk miskin yang terjebak dalam jurang kemiskinan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

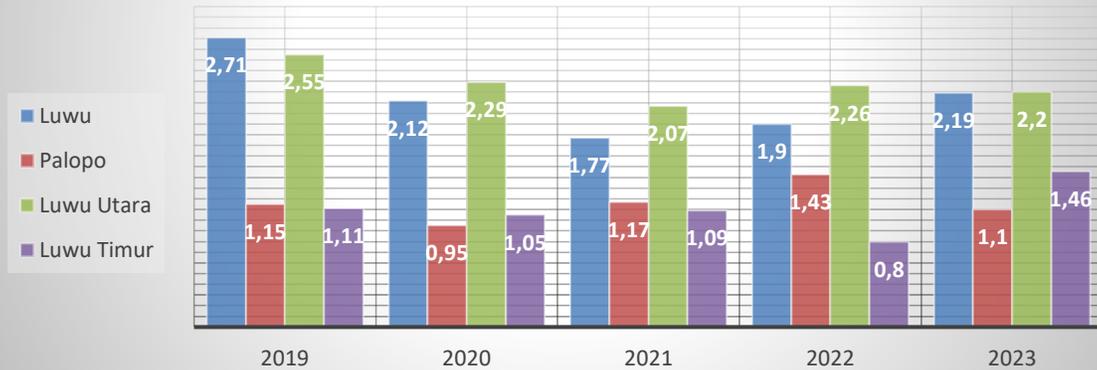
Tabel. 3.4
Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur
dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Karakteristik	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan
1	2	3
Persentase Penduduk Miskin (persen)	6,93	8,70
Indeks P_1	1,46	1,57
Indeks P_2	0,41	0,41
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	438.178	436.025

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2024

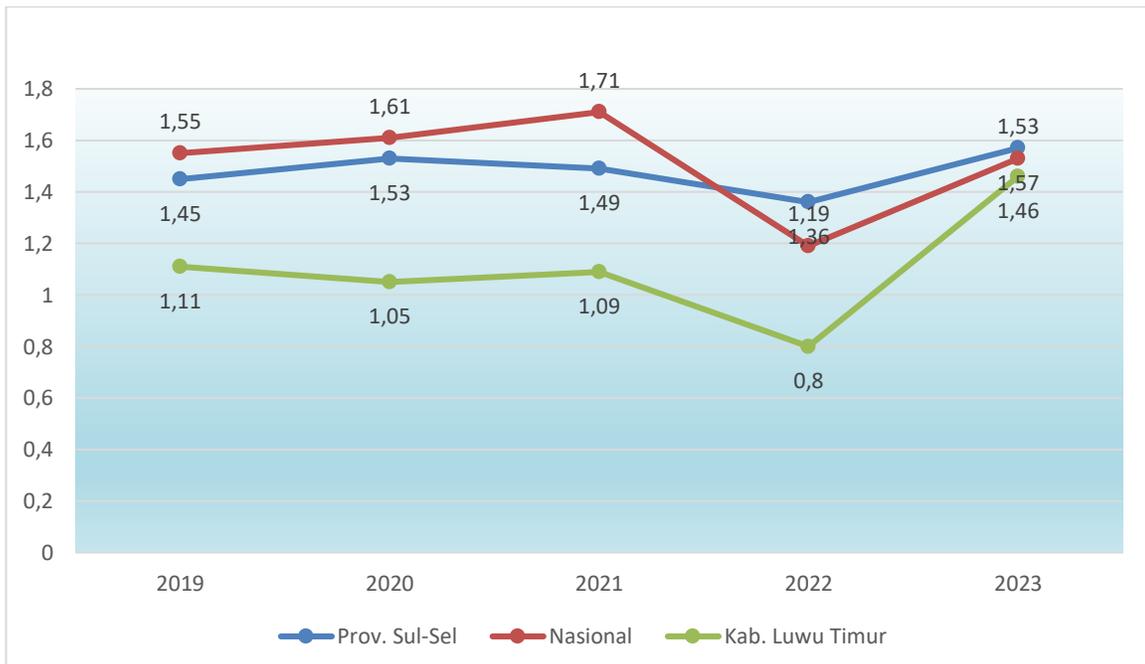


Grafik. 3.5
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se- Luwu Raya Tahun 2019 - 2023

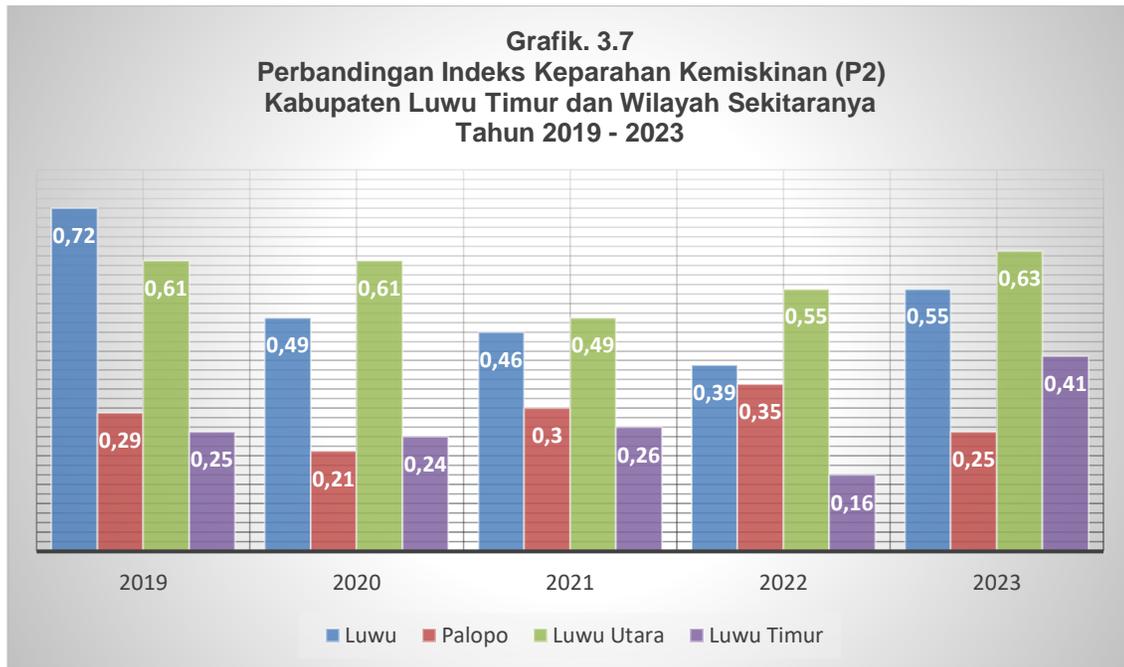


Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Sel 2022

Grafik. 3.6
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Kabupaten Luwu Timur- Prov.Sul-Sel - Nasional Tahun 2019 - 2023



Sumber : BPS Prov.Sulsel dan BPS Nasional 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Sul-Sel 2024

3.2. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Pada tahun 2024. Data P3KE Terdiri dari :

- a. Data sebaran jumlah individu/keluarga (tanpa nama dan alamat) menurut variabel terpilih di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- b. Data individu/keluarga (tanpa nama dan alamat) menurut variabel terpilih di Tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
- c. Data individu/keluarga dengan nama dan alamat (by name by address) menurut variabel terpilih di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa.



Berdasarkan dengan UU No. 27 Tahun Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Sehingga adanya Prosedur Permintaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu perlu menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat permintaan data yang ditujukan kepada: Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Penjelasan mengenai program yang akan menggunakan Data P3KE
- c. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa data nama dan alamat dari P3KE hanya akan digunakan untuk keperluan penetapan sasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem
- d. Layanan terkait permintaan data pensasaran P3KE disediakan tanpa dipungut biaya apapun.

Berikut adalah Rincian Data berdasarkan Jumlah keluarga P3KE Desil 1 sampai dengan Desil 3 Kabupaten.Luwu Timur Berdasarkan Kecamatan Hasil Verifikasi dan Validasi Data yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 yang akan menjadi Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:



Tabel 3.5

Data Sasaran Menurut Jmlah Keluarga Desil 1 s/d Desil 3 Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

NO	KECAMATAN	DESA	DESIL 1					DESIL 2						DESIL 3								
			P3KE esil 1) KK	Hasil Validasi Desa					P3KE (desil 2) KK	Hasil Validasi Desa					P3KE (Desil 3) KK	Hasil Validasi Desa						
				mampu	pindah	meninggal	tdk diketahui	Miskin		mampu	pindah	meninggal	tdk diketahui	GANDA		Miskin	MAMPU	PINDAH	MENINGG AL	TIDAK DI KETAHUI	GANDA	MISKIN
1	Burau	Burau	38	10	0	0	28	42	9	0	2	0	0	31	67	12	2	1	0	0	52	
2		Jalaja	96	6	4	0	2	84	80	17	0	2	2	0	59	118	38	9	2	3	0	66
3		Lewonu	14		1	0	1	12	29	4	2	2	2	0	19	51	14	1	1	2	0	33
4		Lambarese	122	24	2	0	2	94	76	12	1	3	1	0	59	97	19	2	3	0	0	73
5		Lauwo	74	17	4	3	0	50	62	21	3	3	0	0	35	114	44	6	5	0	0	59
6		Bonepute	51	4	0	0	0	47	48	6	0	1	0	0	41	58	8	2	1	3	0	44
7		Lumbewe	86	23	1	1	0	61	65	13	1	3	0	0	48	95	21	5	6	2	0	61
8		Mabonta	48	6	0	0	0	42	51	5	0	0	0	0	46	64	11	0	1	1	0	51
9		Laro	61	9	2	1	0	49	39	3	1	3	0	0	32	50	6	1	0	0	0	43
10		Benteng	73	2	4	0	0	67	29	5	0	1	0	0	23	75	6	7	2	0	0	60
11		Batu Putih	15	1	1	0	0	13	19	2	1	1	0	0	15	39	4	3	2	0	0	30
12		Lanosi	61	2	3	3	2	51	31	0	0	0	0	0	31	43	2	0	0	0	0	41
13		Lagego	15	3	0	1	1	10	28	0	1	0	0	0	27	41	6	0	0	0	0	35
14		Cendana	21	14	0	0	0	7	23	20	0	2	0	0	1	41	35	1	1	0	0	4
15		Burau Pantai	27	2	0	0	0	25	27	2	1	0	1	0	23	57	10	1	1	3	0	42
16		Asana	20	20	0	0	0	0	21	17	1	0	0	0	3	27	19	1	0	0	0	7
17		Kalatri	36	0	0	0	0	36	35	14	1	0	3	0	17	48	19	1	1	9	0	18
18		Lambara Harapan	72	16	1	3	1	51	43	8	2	1	0	0	32	61	15	0	3	0	0	43
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			930	159	23	12	9	727	748	158	15	24	9	0	542	1146	289	42	30	23	0	762
1	Tomoni	Bayondo	30	2	1	0	0	27	25	13	1	0	0	11	49	24	1	4	0	0	20	
2		Mulyasri	41	18	0	1	0	22	52	16	5	0	0	0	31	119	45	4	0	2	0	68
3		Lestari	30	9	0	0	0	21	54	20	2	1	0	0	31	112	47	2	3	2	0	58
4		Kalpataru	52	4	1	1	1	45	45	10	1	0	0	0	34	59	12	2	0	0	0	45
5		Tadulako	48	13	4	2	1	28	27	7	0	1	1	0	18	35	12	1	1	0	0	21
6		Beringin Jaya	32	7	0	7	0	24	29	2	0	1	0	0	26	63	5	3	3	0	0	52
7		Bangun Jaya	22	2	0	0	0	20	51	36	0	0	0	0	15	87	72	0	2	0	0	13
8		Mandiri	26	7	0	1	1	17	47	15	0	0	0	0	32	58	14	1	1	0	0	42
9		Sumber Alam	18	3	3	1	0	11	25	2	0	0	0	0	23	22	2	0	0	0	0	20
10		Ujung Baru	4		3	0	0	1	9	6	0	0	0	0	3	8	5	1	0	0	0	2
11		Bangun Karya	47	7	0	2	0	38	49	10	3	0	1	0	35	51	20	0	1	3	0	27
12		Kelurahan Tomoni	56	19	2	2	2	31	58	29	5	2	0	0	22	103	54	3	3	0	0	43
13		Rante Mario	95	39	0	5	3	48	48	6	0	1	0	0	41	46	5	0	1	0	0	40
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			501	130	14	22	8	333	519	172	17	6	2	0	322	812	317	18	19	7	0	451
1		Kertoraharjo	9	3	0	0	1	5	16	7	0	0	0	9	45	16	0	0	0	0	29	
2		Cendana Hitam	6	0	0	0	0	6	19	6	1	0	0	12	31	7	0	1	0	0	23	



3	Tomoni Timur	Purwosari	12	0	0	4	0	8	29	23	1	0	0	0	5	79	66	1	5	0	0	7
4		Pattengko	93	49	0	0	1	43	43	12	0	0	0	0	31	72	33	1	4	0	0	34
5		Manunggal	25	3	1	0	2	19	35	0	1	1	0	0	33	64	2	0	0	0	0	62
6		Margomulyo	50	11	2	1	0	36	49	16	0	4	1	0	28	94	31	1	1	0	0	61
7	Alam Buana	10	0	0	0	0	10	11	0	0	0	0	0	11	15	5	0	0	0	0	10	
8		Cendana Hitam Timur	15	0	0	0	0	15	20	8	0	0	0	0	12	48	8	0	2	0	0	38
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			220	66	3	5	4	142	222	72	3	5	1	0	141	448	168	3	13	0	0	264
1	Mangkutana	Maleku	49	30	3	2	0	14	69	56	3	1	0	0	9	75	49	5	3	0	0	18
2		Wonorejo	35	11	0	2	1	21	34	6	0	2	2	0	24	80	32	0	2	3	0	43
3		Margolembo	24	10	0	0	0	14	38	13	0	0	0	0	25	75	12	1	2	0	0	60
4		Teromu	36	21	0	2	0	13	41	13	2	0	0	0	26	62	16	2	2	0	0	42
5		Manggala	70	69	0	0	0	1	26	26	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0
6		Kasintuwu	25	10	1	1	0	13	33	2	0	0	2	0	29	93	0	0	1	0	0	92
7		Balai Kembang	53	10	2	2	2	37	33	5	0	1	0	0	27	43	7	0	2	0	0	34
8		Panca Karsa	18	0	0	0	0	18	30	4	1	1	0	0	24	75	9	2	2	0	0	62
9		Sindu Agung	10	2	0	1	0	7	25	5	0	0	0	0	20	54	5	0	1	2	0	46
10		Wonorejo Timur	31	9	0	1	1	20	40	29	0	0	2	0	9	65	34	1	2	1	0	27
11	Koroncia	32	0	1	0	0	31	28	4	0	0	1	0	23	29	11	1	1	2	0	14	
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			383	172	7	11	4	189	397	163	6	5	7	0	216	672	196	12	18	8	0	438
1	Angkona	Tawakua	37	2	0	0	0	35	44	8	3	2	0	0	31	94	37	0	0	0	0	57
2		Tampinna	36	17	0	1	0	18	31	6	0	0	0	0	25	43	9	1	2	0	0	31
3		Solo	14	0	0	0	0	14	7	0	0	0	0	0	7	31	8	1	1	0	0	21
4		Taripa	103	31	3	0	1	68	63	17	0	5	0	0	41	105	34	0	3	0	0	68
5		Mantadulu	38	7	0	0	0	31	40	9	2	2	0	0	27	78	17	3	0	0	0	58
6		Balirejo	11	2	0	0	0	9	11	2	0	0	0	0	9	27	4	2	1	0	0	20
7		Maliwowo	33	22	4	1	0	6	25	10	2	0	0	0	13	60	36	1	1	0	0	22
8		Lamaeto	34	1	0	0	0	33	36	7	1	1	1	0	26	87	25	1	3	1	0	57
9		Watangpanua	11	2	0	1	0	8	15	7	1	1	0	0	6	28	8	3	2	0	0	15
10		Wanasari	5	2	0	0	0	3	9	2	0	0	0	0	7	7	3	0	0	0	0	4
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			322	86	7	3	1	225	281	68	9	11	1	0	192	560	181	12	13	1	0	353
1	WOTU	Lampenai	191	68	3	4	0	116	137	18	2	4	0	0	113	127	19	0	4	0	0	104
2		Tarengge	10	1	3	0	1	5	9	6	3	0	0	0	0	19	18	1	0	0	0	0
3		Maramba	40	1	1	0	3	35	24	3	1	0	0	0	20	54	4	2	1	0	0	47
4		Cendana Hijau	25	6	0	0	0	19	54	10	2	2	2	0	38	100	26	0	1	3	0	70
5		Bawalipu	44	19	0	0	4	21	27	5	2	0	1	0	19	49	13	3	2	4	0	27
6		Kalaena	48	6	3	1	0	38	26	6	1	0	0	0	19	31	7	0	1	0	0	23
7		Lera	69	7	0	1	0	61	60	12	4	0	1	0	43	126	31	7	0	0	0	88
8		Kanawatu	23	0	0	0	0	23	32	3	2	0	0	0	27	35	5	1	0	0	0	29
9		Bahari	21	8	1	0	0	12	27	13	0	3	0	0	11	30	13	1	1	1	0	14
10		Karambua	13	0	0	0	1	12	8	5	0	0	1	0	2	23	8	0	1	1	0	13
11		Pepuro Barat	5	0	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	5	14	6	0	0	0	0	8
12		Balobalo	16	0	0	0	0	16	14	2	2	0	1	0	9	19	7	2	0	0	0	10
13		Rinjani	67	0	1	0	5	61	38	2	0	0	0	0	36	62	7	1	0	0	0	54



14		Tarengge Timur	31	3	1	1	0	26	34	7	3	1	1	0	22	45	11	0	1	0	0	33
15		Madani	45	15	1	0	0	29	41	8	0	2	0	0	31	64	15	1	1	0	0	47
16		Tabaroge	9	0	0	0	0	9	15	6	1	1	1	0	6	41	9	1	1	5	0	25
17		Arolipu	21	20	0	1	0	0	16	2	0	0	0	0	14	27	2	0	0	0	0	25
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			678	154	14	8	14	488	568	109	23	13	8	0	415	866	201	20	14	14	0	617
1	Kalaena	Kalaena Kiri	9	6	0	0	0	3	22	15	0	0	0	0	7	48	30	0	0	0	0	18
2		Sumber Agung	23	0	3	0	1	19	39	5	5	1	0	0	28	74	8	2	1	0	0	63
3		Pertasi Kencana	6	3	0	0	0	3	13	2	0	0	0	0	11	25	9	0	0	0	0	16
4		Non Blok	63	19	5	0	5	34	23	8	0	2	0	0	13	45	13	0	2	3	0	27
5		Argomulyo	17	13	1	0	0	3	18	13	0	0	1	0	4	55	37	2	3	1	0	12
6		Sumber Makmur	27	19	0	0	0	8	29	26	0	0	0	0	3	65	61	0	0	0	0	4
7		Mekar Sari	11	7	0	0	0	4	15	2	0	1	0	0	12	44	10	2	0	0	0	32
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			156	67	9	0	6	74	159	71	5	4	1	0	78	356	168	6	6	4	0	172
1	Wasuponda	Ledu Ledu	98	9	1	2	0	86	57	12	0	1	0	0	44	69	16	2	0	0	0	51
2		Kawata	23	17	1	0	0	5	18	14	1	1	0	0	2	36	20	2	1	0	0	13
3		Tabarano	41	9	0	0	1	31	47	14	1	0	0	0	32	51	19	2	0	0	1	29
4		Wasuponda	33	16	0	2	0	15	18	7	0	0	0	1	10	30	18	2	0	0	0	10
5		Parumpanai	132	45	6	4	0	77	55	34	3	2	2	0	14	86	56	3	4	2	0	21
6		Balambano	18	16	0	1	1	0	21	1	0	2	0	0	18	65	6	0	1	0	0	58
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			345	112	8	9	2	214	216	82	5	6	2	1	120	337	135	11	6	2	1	182
1	Towuti	Loeha	37	14	0	0	0	23	34	14	2	1	0	0	17	44	17	1	1	1	0	24
2		Mahalona	26	5	5	0	2	14	41	20	5	2	0	0	14	67	25	10	0	0	0	32
3		Timampu	50	1	0	2	0	47	58	46	1	0	6	0	5	94	78	1	1	2	2	10
4		Wawondula	26	2	0	0	0	24	32	11	0	0	0	0	21	46	13	0	0	0	0	33
5		Langkea Raya	50	3	1	1	2	43	47	26	1	1	1	0	18	105	62	1	3	4	0	35
6		Tokalimbo	4	2	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	4	8	4	0	0	2	0	2
7		Baruga	45	25	2	1	0	17	24	9	2	0	3	0	10	42	20	1	1	4	0	16
8		Pekalao	36	25	0	0	0	11	27	26	0	0	0	0	1	53	41	0	1	0	0	11
9		Lioka	32	10	0	1	0	21	32	8	0	1	0	0	23	59	27	0	1	0	0	31
10		Asuli	29	6	0	0	3	20	32	28	0	0	0	0	4	58	55	0	0	0	0	3
11		Bantilang	32	32	0	0	0	0	50	31	1	1	0	0	17	85	77	0	0	0	0	8
12		Masiku	8	0	1	3	0	4	17	6	0	1	2	0	8	23	9	2	0	0	0	12
13		Rante Angin	41	5	0	0	0	36	42	9	0	1	0	0	32	66	15	2	1	0	0	48
14		Matompi	39	30	0	2	0	7	34	24	0	0	0	0	10	52	45	0	1	0	0	6
15		Tole	26	7	0	1	2	16	35	12	0	5	0	0	18	46	17	0	0	0	0	29
16		Libukan Mandiri	64	16	0	1	6	41	40	11	4	0	0	0	25	57	17	1	2	0	0	37
17		Kalosi	19	2	3	1	0	13	30	23	3	0	0	0	4	52	41	5	0	0	0	6
18		Buangin	79	40	10	0	0	29	33	17	0	0	0	0	16	61	38	0	0	0	0	23
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			643	225	23	13	15	367	612	321	19	13	12	0	247	1018	601	24	12	13	2	366



1	Nuha	Nuha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2		Nikkel	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	13	11	1	0	1	0	0
3		Matano	28	1	0	0	0	27	18	2	1	0	0	0	15	31	4	0	1	0	0	26
4		Sorowako	21	17	3	1	0	0	34	34	0	0	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0
5		Kelurahan Magani	8	3	0	0	0	5	9	5	0	0	0	0	4	23	9	1	1	0	0	12
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			58	22	3	1	0	32	64	44	1	0	0	0	19	159	116	2	2	1	0	38
1	Malili	Harapan	41	0	0	0	0	41	62	25	0	0	0	0	37	90	33	0	1	0	0	56
2		Laskap	8	2	1	0	0	5	9	5	0	0	0	0	4	31	21	1	0	0	0	9
3		Manurung	14	5	0	0	1	8	19	2	0	0	0	0	17	60	8	3	0	0	0	49
4		Wewang Riu	7	0	0	0	0	7	15	9	0	1	0	0	5	39	20	0	0	0	0	19
5		Baruga	16	12	0	0	0	4	18	9	0	1	0	0	8	56	31	1	2	0	0	22
6		Lakawali	30	23	0	0	0	7	25	12	0	0	0	0	13	67	24	2	2	0	0	39
7		Ussu	11	7	2	0	1	1	9	2	0	0	1	0	6	18	7	0	0	1	0	10
8		Tarabbi	38	32	0	3	1	2	41	33	0	0	4	0	4	48	34	0	3	5	0	6
9		Balantang	2	0	0	1	0	1	7	4	1	0	0	0	2	12	8	2	0	0	0	2
10		Atue	4	2	1	0	0	1	7	1	0	0	0	0	6	10	0	0	0	2	0	8
11		Pongkeru	76	1	0	2	1	72	55	4	0	0	2	0	49	60	2	0	1	3	0	54
12		Puncak Indah	14	2	0	0	2	10	17	1	0	0	0	0	16	44	1	0	0	2	0	41
13		Pasi-pasi	27	0	0	1	0	26	18	9	1	1	0	0	7	26	13	1	0	0	0	12
14		Lakawali Pantai	10	2	2	0	0	6	22	8	0	0	1	0	13	34	12	0	1	0	0	21
15		Kelurahan Malili	25	5	2	1	2	15	18	9	1	1	2	0	5	55	38	1	4	0	0	12
TOTAL KESELURUHAN PER KECAMATAN			323	93	8	8	8	206	342	133	3	4	10	0	192	650	252	11	14	13	0	360
JUMLAH KESELURUHAN PER KABUPATEN LUWU TIMUR			4559	1286	119	92	71	2997	4128	1393	106	91	53	1	2484	7024	2624	161	147	86	3	4003

Sumber: Bapelitbangda Kab.Luwu Timur 2023 (data di olah)



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Total data kemiskinan berdasarkan keluarga pada tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yaitu untuk desil 1 sebanyak 2997 Keluarga yang dimana sebelumnya berjumlah 4559 data menurut keluarga, untuk desil 2 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data yakni yang berjumlah 2484 Keluarga dan untuk desil 3 setelah verifikasi dan validasi data berjumlah 4003 data keluarga yang Dimana sebelumnya berjumlah 7024 data keluarga.

Dalam hal ini kami sementara melaksanakan verifikasi dan validasi data baru tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Verifikasi atau penentu absahan dimaksudkan untuk memeriksa bahwa suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi serangkaian spesifikasi yang dimana kami limpahkan untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah setiap desa, dan selanjutnya untuk hasil dari Verifikasi dan Validasi data di lakukan penetapan dalam bentuk surat Keputusan Bupati yang akan menjadi data sasaran penanggulangan kemiskinan untuk tahun berikutnya yaitu Tahun Anggaran 2025.

3.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari tujuan pembangunan Nasional maupun Daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Dasar kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penanggulangan kemiskinan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, hingga implementasinya dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Arah kebijakan umum Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam



mewujudkan Visi-Misi dan strategi pembangunan dengan menetapkan pada 8 (Delapan) Misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.
2. Mendorong peningkatan investasi daerah.
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dalam melihat arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. arah kebijakan umum yang mengarah kepada penanggulangan kemiskinan dapat ditunjukkan melalui satu atau lebih agenda yang telah disusun yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan tersebut sangat berhubungan erat, dimana penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari satu dimensi saja melainkan banyak dimensi diantaranya kesehatan, pendidikan,



akses terhadap barang dan jasa, lokasi kondisi geografis, infrastruktur, gender dan kondisi lingkungan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai sebagai strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah termasuk didalam terdapat upaya Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Luwu Timur yaitu pada Agenda Ke Satu point 1.b yang berbunyi Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin/golongan tidak mampu.

Sasaran umum penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang adalah berkurangnya jumlah penduduk dan desa miskin serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan secara rinci, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya prosentase jumlah keluarga pra keluarga sejahtera;
- b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau;
- c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
- d. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata;
- e. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
- f. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang sehat;
- g. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin;
- h. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- i. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan;
- j. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan



Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024 dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dan implementasinya yaitu

1. Menghapus Kemiskinan
2. Mengakhiri Kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan
4. Pendidikan Bermutu
5. Kesetaraan Gender
6. Akses Air Bersih dan Sanitasi
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
9. Infrastruktur, Industri dan Inovasi dan Mengurangi Ketimpangan

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.4.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih atau pun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Kepala Daerah atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. pendanaan tersebut berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah.



Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Desember 2023, maka perubahan kebijakan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan berdasarkan realisasi PAD sampai dengan Juni 2023 dan proyeksi potensi penerimaan pendapatan sampai dengan akhir tahun.
- b. Penyesuaian terhadap silpa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.4.2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp1.714.005.834.919.00 dan sesudah perubahan mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen atau Rp62.602.448.504,00 sehingga menjadi Rp1.776.608.283.423.00. Adapun perubahan struktur pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan dalam tabel berikut :



Tabel. 3.6
Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	65,759,782,372.00	3.8
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	384,403,489,900	390,691,353,806	6,287,863,906	1.6
4.1.01	Pajak Daerah	203,728,578,900	238,588,526,149	34,859,947,249	17.1
4.1.02	Retribusi Daerah	8,747,034,000	5,177,658,500	-3,569,375,500	(40.8)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47,391,000,000	23,588,575,458	-23,802,424,542	(50.2)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124,536,877,000	123,336,593,699	-1,200,283,301	(1.0)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,273,572,345,019	1,323,464,643,617	49,892,298,598	3.9
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,013,207,000	1,073,605,505,598	23,592,298,598	2.2
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223,559,138,019	249,859,138,019	26,300,000,000	11.8
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5
4.3.01	Pendapatan Hibah	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	-
	Jumlah Pendapatan	1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	65,759,782,372	3.8

Sumber: BKAD (Data Olahan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)

3.4.3 Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu, yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan daerah.

Dalam Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 secara umum Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen atau sebesar Rp6,287,863,906.00,. yaitu dari Rp384,403,489,900.00 pada APBD Tahun 2023 menjadi Rp390,691,353,806.00 pada Perubahan APBD Tahun 2023.



Pendapatan Asli Daerah terbagi dalam 4 komponen utama yaitu Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Bertambah berkurang terjadi pada sebagian besar obyek pendapatan dengan memperhatikan tingkat capaian realisasi sampai dengan semester I Tahun 2023 dan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan sampai dengan Desember 2023. Beberapa penambahan target antara lain pada ;

- a. Pajak Daerah perubahan dari Rp203,728,578,900.00 menjadi Rp238,588,526,148.00 atau meningkat sebesar Rp34,859,947,249.00 atau 17 persen. Penambahan komponen pajak daerah yang sangat signifikan terjadi pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana terjadi kenaikan target pajak sebesar 581 persen atau sebesar Rp69,756,467,249.00, dimana target tersebut diasumsikan antara lain diperoleh dari pembayaran BPHTB dari PT.Vale.tbk. Namun terdapat pula koreksi target pendapatan pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yaitu turun sebesar 29 persen atau Rp35,000,000,000,00 dengan pertimbangan Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan potensi penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru.
- b. Restribusi Daerah ditargetkan mengalami perubahan dari Rp8,747,034,000.00 menjadi Rp5,177,658,500.00 atau turun sebesar Rp3,569,375,500.00 atau minus 41 persen. Dimana terjadi penurunan pada hampir semua yaitu objek restribusi jasa umum minus 14 persen, Restribusi jasa usaha minus 27 persen dan restribusi Perizinan tertentu minus 62 persen. Salah satu penyebab terjadinya penyesuaian target pendapatan pada retribusi daerah adalah sebagai konsekuensi dari



Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantinya dengan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan untuk itu SKPD teknis PUPR perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami perubahan target dari Rp47,391,000,000.00 menjadi Rp23,588,575,458.00 atau turun sebesar Rp 23,802,424,542.00 atau minus 50 persen. Hal tersebut terjadi pada obyek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan target dari Rp124,536,877,000.00 menjadi Rp123,336,593,699.00, atau turun sebesar Rp1,200,283,301.00 atau minus 1 persen dari anggaran pokok. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan jasa layanan BLUD



Lebih lanjut Perubahan target pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	384,403,489,900	390,691,353,806	6,287,863,906	1.6	
4.1	Pajak Daerah	203,728,578,900	238,588,526,149	34,859,947,249	17.1	
4.1.01	Pajak Hotel	1,500,000,000	1,257,080,000	(242,920,000)	(16.2)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023 dan kurangnya tingkat occupancy yang disebabkan masih minimnya event-event yang diasumsikan dapat mendatangkan pengunjung.
4.1.01.07	Pajak Restoran	9,700,000,000	10,036,400,000	336,400,000	3.5	Masih sejalan dengan realisasi sd.Juni 2023 dan asumsi penerimaan s.d desember 2023
4.1.01.08	Pajak Hiburan	55,000,000	55,000,000	-	-	Masih sejalan dengan tingkat realisasi dan objek pajak dipengaruhi oleh faktor cuaca dan potensi yang ada.
4.1.01.09	Pajak Reklame	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	Menargetkan objek pajak baru reklame yang terpasang dan yang akan diperpanjang
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	52,948,578,900	53,448,578,900	500,000,000	0.9	peningkatan setoran PPJ oleh PT PLN, PT. Vale Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya.
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25,000,000	35,000,000	10,000,000	40.0	peningkatan volume penggunaan air tanah oleh pengusaha dan bertambahnya wajib pajak baru
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	120,000,000,000	85,000,000,000	(35,000,000,000)	(29.2)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru.
4.1.01.15	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	6,000,000,000	5,500,000,000	(500,000,000)	(8.3)	Penyesuaian realisasi s.d juni 2023 dan beberapa piutang pajak PBB-P2 yang diasumsikan tidak terbayarkan ditahun 2023.
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	12,000,000,000	81,756,467,249	69,756,467,249	581.3	peningkatan jumlah rata2 transaksi perbulan dan berapa sertifikat PT.Vale Indonesia yang mengalami pembaharuan serta adanya penerimaan BPHTB PT.Vale Indonesia.
4.1.02	Retribusi Daerah	8,747,034,000	5,177,658,500	(3,569,375,500)	(40.8)	



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1,668,875,000	1,433,999,500	(234,875,500)	(14.1)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2023, dan beberapa objek retribusi jasa umum khususnya parkir yang mengalami penurunan penerimaan.
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3,076,159,000	2,241,659,000	(834,500,000)	(27.1)	Penyesuaian trend realisasi penerimaan, dan penyesuaian potensi yang ada.
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,002,000,000	1,502,000,000	(2,500,000,000)	(62.5)	Penurunan pada retribusi PBG yang dulunya IMB, dimana SKPD teknis PUPR masih perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	47,391,000,000	23,588,575,458	(23,802,424,542)	(50.2)	
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	47,391,000,000	23,588,575,458	(23,802,424,542)	(50.2)	Penurunan target disebabkan asumsi peresentase saham meningkat dengan adanya penambahan modal di Tahun 2023, namun dalam perjalanannya terdapat kabupaten/kota yang menambah penyertaan modalnya dan ada yang tidak mengambil devidennya tetapi menambah penyertaan modalnya pada PT. Bank Sulselbar
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	124,536,877,000	123,336,593,699	(1,200,283,301)	(1.0)	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		821,778,522	821,778,522	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah		222,466,365	222,466,365	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.05	Jasa Giro	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	Menyesuaikan karena jasa giro yang diterima menyesuaikan dengan kondisi kas setiap bulannya
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		1,894,367,863	1,894,367,863	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah		11,155,654	11,155,654	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian		61,967,206	61,967,206	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD					Penurunan target disebabkan oleh karena



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
		117,772,607,458	109,588,487,537	(8,184,119,921)	(6.9)	melihat trend penerimaan yang sudah diasumsikan akan mengalami penurunan atau tidak terealisasi.
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	1,764,269,542	5,735,865,552	3,971,596,010	225.1	peningkatan jumlah jasa layanan pada PKM
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		505,000	505,000	100.0	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD 2023)



3.4.4 Perubahan Pendapatan Transper

Dalam Perubahan Penjabaran APBD untuk Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp1,273,572,345,019.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp 1,323,464,643,617.00 atau mengalami kenaikan 3,9 persen yaitu sebesar Rp 49,892,298,598.00. Pendapatan Transfer secara umum terdiri dari 2 komponen pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar 2,2 persen atau Rp23,592,298,598.00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 11,8 persen atau Rp 26,300,000,000.00. Bertambah berkurang pada Pendapatan Transfer ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Dana Perimbangan mengalami penambahan target pendapatan sebesar 1persen atau Rp8,296,746,598.00 yang merupakan hasil dari bertambah berkurang pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sehingga Dana Perimbangan pada Penjabaran perubahan APBD menjadi Rp950,972,873,598.00. Perubahan pendapatan juga terjadi pada Dana Desa yaitu mengalami perubahan target dari Rp107,277,080.00 menjadi Rp110,838,130.00 atau naik sebesar Rp3,561,050,000.00 atau 3,3 persen.

Selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami perubahan diproyeksikan bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil pada jenis obyek Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp18,300,000.000 (9 persen). Disamping itu juga terjadi peningkatan Bantuan Keuangan pada obyek Bantuan Keuangan dari Pemerintah



Provinsi sebesar Rp8,000,000,000.00. Uraian pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,273,572,345,019	1,323,464,643,617	49,892,298,598	3.9	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,050,013,207,000	1,073,605,505,598	23,592,298,598	2.2	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	942,736,127,000	950,972,873,598	8,236,746,598	0.9	Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi kurang/lebih salur untuk dana bagi hasil tahun 2023
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	238,836,825,000	251,916,136,898	13,079,311,898	5.5	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	538,151,782,000	538,151,782,000	-	-	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28,525,900,000	25,658,610,700	(2,867,289,300)	(10.1)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	137,221,620,000	135,246,344,000	(1,975,276,000)	(1.4)	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	11,794,502,000	11,794,502,000	100.0	
4.2.01.05	Dana Desa	107,277,080,000	110,838,130,000	3,561,050,000	3.3	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	223,559,138,019	249,859,138,019	26,300,000,000	11.8	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	214,898,402,019	233,198,402,019	18,300,000,000	8.5	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19,075,604,000	19,075,604,000	-	-	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18,500,000,000	18,500,000,000	-	-	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39,119,348,019	41,419,348,019	2,300,000,000	5.9	
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	121,703,450,000	134,203,450,000	12,500,000,000	10.3	peningkatan penerimaan DBH dari pemrov atas penggunaan air permukaan
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16,500,000,000	20,000,000,000	3,500,000,000	21.2	Menyesuaikan SK Gubernur terkait pajak rokok 2023
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	8,660,736,000	16,660,736,000	8,000,000,000	92.4	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	8,660,736,000	8,660,736,000	-	-	Menyesuaikan SK Gubernur yang keluar dalam tahun berjalan



No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp	%	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		8,000,000,000	8,000,000,000	100.0	Menyesuaikan bantuan keuangan khusus dari provinsi Sulawesi selatan

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD)

3.4.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp56,030,000,000.00 dan sesudah perubahan menjadi Rp62,452,286,000.00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp6,422,286,000.00 atau 11 persen. Kenaikan tersebut ditargetkan pada obyek pendapatan hibah sebesar Rp6.422,286,000.00.

Uraian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

3.9

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5	
4.3.01	Pendapatan Hibah	56,030,000,000	62,452,286,000	6,422,286,000	11.5	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8,126,000,000	11,548,286,000	3,422,286,000	42.1	Penyesuaian pendapatan hibah dari pemerintah pusat
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47,904,000,000	50,904,000,000	3,000,000,000	6.3	menyesuaikan dengan jumlah rata2 penerimaan dari PT. PLN dan potensi dari hasil lelang scrab/besi tua tahun 2023 oleh PT. Vale Indonesia Tbk

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



Perubahan Pendapatan pada penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditopang oleh kinerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber-sumber Pendapatan yaitu 19 OPD mengalami perubahan target pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perangkat Daerah Penopang Sumber Pendapatan

No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	1,844,269,542	5,991,372,912	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas (3 PKM yang belum BLUD)
2	Puskesmas Burau	1,668,000,000	1,980,587,804	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
3	Puskesmas Wotu	2,346,084,000	2,683,576,311	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
4	Puskesmas Mangkutana	1,944,000,000	2,098,600,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
5	Puskesmas Tomoni	1,992,000,000	2,243,765,400	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
6	Puskesmas Tomoni Timur	1,103,123,200	1,382,500,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
7	Puskesmas Kalaena	1,260,000,000	1,600,053,678	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
8	Puskesmas Angkona	1,849,582,500	2,180,468,948	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
9	Puskesmas Lakawali	902,000,000	1,192,372,264	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
10	Puskesmas Malili	2,537,559,808	3,064,038,476	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
11	Puskesmas Lampia	935,493,850	933,405,569	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
12	Puskesmas Wasuponda	1,408,858,000	1,662,739,574	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
13	Puskesmas Nuha	1,212,000,000	1,345,000,000	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
14	Puskesmas Wawondula	1,536,000,000	2,125,376,218	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
15	Puskesmas Mahalona	1,045,906,100	1,045,906,100	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
16	Puskesmas Bantilang	1,032,000,000	1,065,452,195	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
17	RSUD I LAGALIGO	95,000,000,000	83,000,000,000	Pendapatan BLUD
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,000,000,000	3,036,188,322	Retribusi Pemakaian Kekayaan Alat
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	604,800,000	604,800,000	Retribusi Penyewaan Bangunan
20	Satuan Polisi Pamong Praja	-	505,000	Lain-lain PAD yang sah (berdasarkan inkhract)
21	Dinas Lingkungan Hidup	20,000,000	40,000,000	Retribusi Pengujian Sampel Laboratorium
22	Dinas Perhubungan	1,108,080,000	958,080,000	Retribusi Jasa Umum, Restribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu



No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	2	3	4	5
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	700,000,000	625,504,500	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
24	Dinas Perikanan	491,750,000	280,000,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Bangunan
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	255,000,000	399,199,268	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	100,000,000	100,000,000	Retribusi Pelayanan Tera Ulang
27	Sekretariat Daerah	152,529,000	135,779,000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1,286,698,345,019	1,341,073,408,314	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah	299,023,578,900	313,512,463,570	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
30	Kecamatan Wotu	10,080,000	10,080,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
31	Kecamatan Tomoni	62,500,000	63,500,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
32	Kecamatan Kalaena	13,000,000	21,300,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
33	Kecamatan Malili	80,915,000	83,880,000	Retribusi Sewa Losd Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
34	Kecamatan Towuti	68,380,000	68,380,000	Retribusi Sewa Losd Pasar
Total Pendapatan		1,714,005,834,919	1,776,608,283,423	

Sumber, BAPENDA (Data olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2023)



3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Semester I Triwulan II Sampai 30 Juni Tahun 2024

Realisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Semester. I Triwulan II Sampai 30 Juni Tahun 2024,

Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kab. Luwu Timur Semester I Tahun 2024

SEMESTER I (TRIWULAN I DAN TRIWULAN II)

PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG ADA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Miskin (Bantuan Langsung/Bantuan Sosial)

NO.	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024				LOKASI	KETERANGAN
					TARGET		REALISASI			
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA		
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1.405.000.000,00	48 Klmpkl	Rp -	-	Kab Luwu Timur	Indikator Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 105 kelompok
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut	Penyediaan Perumahan	Rp 743.316.000,00	260 Jadup LKSA/Penghuni Panti, 20 Jadup Penyandang Disabilitas	Rp 527.186.800,00	260 Jadup LKSA/Penghuni Panti dan 8 Penerima	Kab Luwu Timur	Indikator Bansos Jadup LKSA/Penghuni Panti, Jadup Penyandang Disabilitas ODKB, Jadup Lansia Tidak Potensial dan Bansos Barang



			usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial			ODKB, 30 Jadup Lansia Tidak Potensial dan 10 Penerima Bansos Barang		Bansos Barang		
TOTAL ANGGARAN					Rp 2.148.316.000,00		Rp 527.186.800,00			
2	BAGIAN KESRA SETDAKAB. LUWU TIMUR	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 1.528.000.000,00	382 orang	Rp -	-	BAGIAN KESRA SETDAKAB. LUWU TIMUR	Orang/Tahun
TOTAL ANGGARAN					Rp 1.528.000.000,00		Rp -			
3	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp 1.885.982.000,00	18 PKM	Rp 10.060.200,00	0%	Kab Luwu Timur	Untuk meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dengan melalui pengadaan alat kesehatan.
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan		Rp 5.062.076.600,00	100%	Rp 933.672.100,00	18%	Kab Luwu Timur	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 446.821.000,00	100%	Rp 96.622.220,00	22%	Kab Luwu Timur	



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 5.480.784.000,00	100%	Rp 1.786.500.000,00	33%	Kab Luwu Timur	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 897.570.000,00	100%	Rp 7.455.000,00	1%	Kab Luwu Timur	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 187.959.500,00	100%	Rp 42.103.760,00	22%	Kab Luwu Timur	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 64.730.000,00	100%	Rp 7.670.000,00	12%	Kab Luwu Timur	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 249.330.000,00	100%	Rp 51.947.480,00	21%	Kab Luwu Timur	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 76.978.000,00	100%	Rp 6.230.000,00	8%	Kab Luwu Timur	



		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 488.441.900,00	100%	Rp 44.772.780,00	9%	Kab Luwu Timur
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp 98.691.670,00	100%	Rp -	0%	Kab Luwu Timur
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 378.730.435,00	100%	Rp 55.215.500,00	15%	Kab Luwu Timur
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 50.960.000,00	100%	Rp 7.210.000,00	14%	Kab Luwu Timur
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 765.035.000,00	100%	Rp 30.043.010,00	4%	Kab Luwu Timur



			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Rp 231.425.000,00	100%	Rp 9.470.000,00	4%	Kab Luwu Timur	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp 683.495.000,00	100%	Rp 81.189.860,00	12%	Kab Luwu Timur	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Rp 56.689.759.800,00	100%	Rp 24.132.856.849,00	43%	Kab Luwu Timur	
			Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat		Rp 193.258.000,00	100%	Rp 22.997.000,00	12%	Kab Luwu Timur	
4	RSUD I LAGALIGO	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		Rp 263.425.000,00	100%	Rp 81.189.860,00	31%	Kab Luwu Timur	Penyediaan fasilitas (mobil operasional pengantaran pasien pasca rawat inap rumah sakit)
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/ Kota		Rp 5.679.589.000,00	35055 jiwa	Rp 24.132.856.849,00	425%	Kab Luwu Timur	Penyediaan layanan



		PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD		Rp 95.000.000.000,00	11	Rp 22.997.000,00	0%	Kab Luwu Timur	Penyediaan layanan, fasilitas & pengembangan SDM
TOTAL ANGGARAN					Rp 182.227.673.905,00		Rp51.563.059.468,00			

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

(Sosial dan Ekonomi)

NO.	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022				LOKASI	KETERANGAN
					TARGET		REALISASI			
					ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA		
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 125.000.000.000,00	125 Desa	Rp16.712.669.042,00	125 Desa	Kabupaten Luwu Timur	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebesar 1 Milyar/Desa
TOTAL ANGGARAN					Rp 125.000.000.000,00		Rp16.712.669.042,00			
2	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 1.318.276.255,00	186 Orang	Rp -	-	-	Pelatihan dan Pendidikan Calon tenaga Kerja, kerjasama Akademi Teknik Soroako (ATS) sebanyak 60 Orang dan Pendidikan dan Pelatihan kerjasama dengan BLK Makassar sebanyak 16 Orang serta Pelatihan berbasis Kompetensi K3 (setifikat SIO) sebanyak 35 orang. Pelatihan Kerjasama BLK telah terlaksana sebanyak 16 orang dan ATS sebanyak 30 orang.



										Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian calon tenaga kerja agar bisa bersaing dalam pasar kerja.	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 60.528.700,00	80 Orang	Rp	-	-	-	Bimbingan serta sosialisasi terhadap calon tenaga kerja utamanya bagi Lulusan Sekolah/ pendidikan Kejuruan
				Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 157.892.100,00	40 Orang	Rp	-	-	-	Pembinaan terhadap Tenaga Kerja Mandiri serta pendampingan dan fasilitasi kelompok usaha mandiri. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM para pekerja pelaku usaha/TKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
						5 Kelompok	Rp	-	-	-	
TOTAL ANGGARAN					Rp 1.536.697.055,00		Rp	-			
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAK	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan	Rp 171.360.750,00	254 Dokumen	Rp	-	0 Dokumen		Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa



T DAN DESA	ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MESYARAKAT HUKUM ADAT	Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelaksana hukum adat yang sama dalam kabupaten /kota	lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					
			Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 113.380.900,00	1 Dokumen	Rp 4.000.000,00	0 Dokumen	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Ekonomi Kecil dan Menengah di Perdesaan
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan	Rp 687.317.820,00	12 Dokumen	Rp 7.000.000,00	1 Dokumen	Meningkatkan Taraf Perekonomian Masyarakat Desa
TOTAL ANGGARAN			Rp 972.059.470,00		Rp 11.000.000,00			



4	DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Rp 7.785.300.000,00	50 Kelompok	Rp 3.256.421.208,00	20 Kelompok	Kec. Burau, Kec. Wotu, Kec. Malili, Kec. Towuti	Kegiatan ini berupa bantuan Alat tangkap dan alat bantu penangkapan ke masyarakat nelayan untuk meningkatkan Jumlah Hasil Produksi Perikanan Tangkap
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.792.665.000,00	32 Kelompok	-	-	-	-
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Rp 436.800.000,00	7 Kelompok	-	-	-	-
TOTAL ANGGARAN					Rp 11.014.765.000,00		Rp 3.256.421.208,00			
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Rp 751.895.800,00	-	Rp 275.365.000,00	37%	Kabupaten Luwu Timur	Meningkatnya Penggunaan Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)
TOTAL ANGGARAN					Rp 751.895.800,00		Rp 275.365.000,00			



6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 116.395.070,00	250 Org	Rp	-	-	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan II TA. 2024 namun blm direalisasikan karena menyesuaikan jadwal sekolah karena sasarannya adalah sekolah yang berada di daerah rawan bencana
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 61.020.750,00	100 Org	Rp	-	-	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan III TA. 2024
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 65.750.000,00	77 buah	Rp	-	-	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan II TA. 2024, namun belum dapat realisasikan karena akan dilakukan perubahan rekening belanja sehingga menunggu perubahan anggaran
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 57.937.060,00	4 desa	Rp	-	-	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan III TA. 2024



			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 35.877.450,00	50 org	Rp -		Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan II TA. 2024, dan saat ini masih dalam proses persiapan penyusunan SK TRC Kabupaten
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 37.138.100,00	250 org	Rp 36.712.100,00	250 Org	Kabupaten Luwu Timur	Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana yang dilakukan merupakan bentuk tindak lanjut Mou BPBD dengan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 625.230.900,00	100%	Rp 83.490.000,00	13%	Kabupaten Luwu Timur	Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Maret 2024 sebanyak 78 kejadian, semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 39.175.000,00	100%	Rp -	0%	Kabupaten Luwu Timur	Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Maret 2024 sebanyak 881 jiwa (484 Laki-laki dan 397 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 39.073.600,00	100%	Rp -	0%	Kabupaten Luwu Timur	Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Maret 2024 sebanyak 881 jiwa (484 Laki-laki dan 397 Perempuan) dan semuanya diberikan bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda).



			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp 28.797.040,00	100%	Rp -	0%	Kabupaten Luwu Timur	Anggaran ini sifatnya disediakan dan Sampai dengan Juni 2024, tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan aktivasi sistem komando tanggap darurat bencana. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d Juni 2024 sebanyak 38 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Rp 20.460.600,00	100%	Rp -	0%	Kabupaten Luwu Timur	Anggaran ini sifatnya disediakan dan Sampai dengan periode Triwulan II tidak ada Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) yang diterima oleh TRC BPBD.
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 18.139.860,00	3 Dokumen	Rp -	0	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan II & III TA. 2024
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 62.553.580,00	1 Forum	Rp -		Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya Triwulan II & III TA. 2024



			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 425.702.020,00	1 Dokumen	Rp 8.330.409,00	-	Kabupaten Luwu Timur	Saat ini masih menunggu PMK terkait Dana Hibah RR
TOTAL ANGGARAN					Rp 1.633.251.030,00		Rp 128.532.509,00			
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp 39.878.000,00	45 Unit usaha	Rp 27.874.260,00	88,89%	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah usaha mikroyang difasilitasi kemudahan untuk mendapatkan perizinan
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 429.625.000,00	70 Unit Usaha	Rp -	-		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp 281.950.200,00	12 Unit usaha	Rp 28.267.950,00	-	Kabupaten Luwu Timur	Berdasarkan anggaran kas direncanakan pelaksanaannya ditriwulan III



	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 400.448.400,00	2100 RTM	Rp	-	-		
TOTAL ANGGARAN				Rp 1.151.901.600,00		Rp	56.142.210,00			

Peningkatan/Infrastruktur dan Pembangunan Fasilitas fisik dalam upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan
(Bidang Infrastruktur)

NO.	OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022				LOKASI	KETERANGAN	
					TARGET		REALISASI				
					ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 16.072.560.000,00	10 liter/detik	Rp	-	-	Kab. Luwu Timur	Belum adanya data kemiskinan secara spesifik, sehingga dampak dari program yang dilaksanakan tidak dapat menyentuh secara spesifik target masyarakat miskin yang membutuhkan, dilain sisi, masyarakat miskin yang membutuhkan justru tidak menerima secara spesifik apa yang mereka butuhkan, Anggaran kecil / butuh anggaran yang besar untuk pemenuhan akses air minum dalam rangka peningkatan jaringan air untuk masyarakat yang kian bertambah, kurang sosialisasi dan pemahaman masyarakat sehingga banyak yang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 4.531.850.000,00	471 SR	Rp	-	-	Kab. Luwu Timur	



										menolak, beberapa infrastruktur yang rusak akibat bencana alam	
TOTAL ANGGARAN					Rp 20.604.410.000,00		Rp	-			
2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan	Rp 541.730.000,00	1 Unit				Kontrak Sudah Selesai menunggu jadwal reuiu inspektorat	
		PROGRAM PENINGKATAN DISERFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 45.676.100,00	1 Laporan				Bidang Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Pengguna Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 52.065.500,00	4 laporan					Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 220.788.250,00	6 paket	Rp 18.000.000,00	1			-



		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Rp 1.111.480.000,00	4 laporan				Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
			Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	Rp 3.045.157.200,00	4 laporan				Bidang Perkebunan
		Penyediaan Benih /Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain\	Rp 1.722.500.000,00	379 ekor				Bidang Peternakan
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Rp 8.123.467.050,00	35 paket				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Rp 105.190.000,00	1 paket				Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tani dan Jalan Produksi
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 2.527.437.500,00	84 paket				Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian



		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Rp 197.990.000,00	100 ekor	Rp 157.533.840,00	78 ekor		Bidang Peternakan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Rp 36.444.500,00	595 ha				Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 1.237.374.650,00	126 Kelompok				Bidang Penyuluhan
TOTAL ANGGARAN					Rp 18.967.300.750,00		Rp 175.533.840,00			
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan perlengkapan siswa SD	Rp 1.183.350.000,00	5635 Paket	Rp -	-		Kegiatan pengadaan perlengkapan siswa berupa bantuan pakaian seragam bagi siswa yang baru masuk pada kelas I jenjang SD, Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan anggaran yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan biaya administrasi , sementara Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2024



			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD	Rp 6.186.000.000,00	412 Orang/ TW	Rp 1.850.000.000,00	412 Orang	Kab. Luwu Timur	Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan diberikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Dasar berupa Gaji guru BOSDA, Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang menerima Gaji BOSDA sebanyak 412 orang dari Sekolah Negeri dan Swasta
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan perlengkapan siswa SMP		Rp 945.000.000,00	4500 Paket	Rp -		Kab. Luwu Timur	Kegiatan pengadaan perlengkapan siswa berupa bantuan pakaian seragam bagi siswa yang baru masuk pada kelas VII jenjang SMP, Untuk realisasi anggaran belum ada terealisasi dikarenakan anggaran yang ditargetkan ditriwulan I adalah Persediaan biaya administrasi , sementara Menunggu pendataan siswa tahun ajaran 2024
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP		Rp 3.033.000.000,00	206 Orang/ TW	Rp 956.000.000,00	206 Orang	Kab. Luwu Timur	Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan diberikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama berupa Gaji guru BOSDA, Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang menerima Gaji BOSDA sebanyak 206 orang dari Sekolah Negeri dan Swasta
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD		Rp 300.000.000,00	19 Orang/ TW	Rp 57.000.000,00	19 Orang	Kab. Luwu Timur	Kegiatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan diberikan bagi Tenaga pendidik dan tenaga



										Kependidikan PAUD berupa Gaji guru BOSDA
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 2.782.590.000,00	10 Satuan Pendidikan	Rp 22.863.500,00	-	Kab. Luwu Timur	Dana DAK Non Fisik dalam mendukung operasional PKBM dalam membantu masyarakat yang tidak menempuh pendidikan formal, adapun anggaran yang terealisasi adalah gaji upah jasa 2 orang, perjalanan dinas, ATK, Kertas, Bahan Cetak dan bahan komputer. untuk selanjutnya sekolah telah melakukan pengimputan di aplikasi ARKAS untuk proses pencairan
TOTAL ANGGARAN					Rp 14.429.940.000,00		Rp 2.885.863.500,00			
4	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara	Rp 2.537.021.450,00	27 unit	Rp 857.840.060,00	27 unit	Kab. Luwu Timur	
				Jumlah angkutan yang disediakan (unit)	Rp 1.817.522.850,00	2 unit	Rp 588.400.000,00	1 unit	Kab. Luwu Timur	
TOTAL ANGGARAN					Rp 4.354.544.300,00		Rp 1.446.240.060,00			



5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 250.000.000,00	-		disesuaikan dengan lokasi yang terkena dampak bencana	Anggaran disiapkan untuk penanganan pasca bencana setelah ditetapkannya Surat Keputusan Bupati terkait Penerima Bantuan	
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Rp 200.000.000,00	10 Unit Rumah	Rp	-			0
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 400.000.000,00	20 Unit Rumah	Rp	-			0
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Rp 500.000.000,00	50 Unit Rumah	Rp			-



	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp 585.740.000,00	7 lokasi	Rp 49.500.000,00	0		1. Rumah Nelayan Desa Patande 2. Rumah Nelayan Desa Mabonta 3. Rumah Nelayan Desa Balo-Balo I 4. Rumah Nelayan Desa Balo-Balo II 5. Rumah Nelayan Desa Lauwo 6. Rumah Nelayan Desa Burau Pantai 7. Rumah Susun Sederhana Sewa Sumasang	Kegiatan dilaksanakan untuk penanganan dan pemeliharaan perumahan nelayan dan rumah susun sederhana sewa yang diperuntukkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Rp 12.724.375.000,00	11 lingkungan	Rp -	0		Tersebar 11 Kecamatan Kab. Luwu Timur	Kegiatan untuk pembangunan prasarana perumahan
TOTAL ANGGARAN				Rp 14.660.115.000,00		Rp 49.500.000,00				
TOTAL TARGET ANGGARAN				Rp 400.980.869.910,00						
TOTAL REALISASI ANGGARAN						Rp77.087.513.637,00	19%			

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Luwu Timur 2023



BAB IV

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melaksanakan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membentuk lembaga pengelola program, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kabupaten Luwu Timur. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Lembaga ini bersifat lintas SKPD dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Luwu Timur Dalam rangka akselerasi dan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 166 / F-02/ V / Tahun 2023, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Tim tersebut mempunyai tugas dan melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan, baik lintas sektor maupun lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan.

Koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Timur dengan fungsi :



1. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Timur dengan fungsi
 - a. Melakukan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - b. Melakukan pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
 - c. Melakukan pengendalian evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskina.

Pada tahun 2024 Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Luwu Timur dijadwalkan 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau 1 kali dalam 3 bulan dan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

4.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur telah berjalan bertahun-tahun dengan baik dan lancar. Kebijakan ini tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat khususnya daya beli dan pendapatan masyarakat, sehingga berpengaruh pada perekonomian daerah. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Ada banyak Program/kegiatan, namun belum semua program menggunakan basis data yang sama dalam penetapan sasaran; melibatkan banyak pihak



dimana setiap institusi Pemerintah memiliki program masing-masing yang belum tentu bersinergi satu dengan yang lainnya Misalnya:

- a. Sebelum 2024 banyak penerima PKH tidak menerima Rastra
 - b. Banyak anak penerima Rastra/BPNT tidak menerima KIP.
2. Banyaknya Program/Kegiatan SKPD tidak Mengacu Pada Basis Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikelola oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial.
 3. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan fungsi pelaksanaan program kegiatan bagi masyarakat dan pemanfaatan hasil hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

4.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan baik APBD maupun APBN tahun 2024 pada Triwulan satu dan ke dua di Kabupaten Luwu Timur terdapat pada BAB III yaitu Realisasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Semester I Triwulan II Sampai 30 Juni Tahun 2024.



4.4. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan.

Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan upaya penanganan kemiskinan;

1. Perlunya sosialisasi dan pendampingan terhadap SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya menggunakan Data Pensasaran Percepatan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan juga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sama dalam penetapan lokasi sasaran dan rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan ke depannya.
2. Agar Pihak Camat dan Desa dapat mengawasi Program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, swasta agar dapat lebih tepat sasaran.
3. Data rumah tangga dan penduduk miskin tahun 2023 yang telah diverifikasi dan validasi Kabupaten Luwu Timur yang digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan ekstrem daerah tahun anggaran 2024. Jika masih terdapat ketidaksesuaian data maupun rumah tangga/penduduk miskin yang tidak terdaftar yang masuk kategori miskin, dapat dilakukan pemutakhiran data ulang.
4. Para Camat dan Desa dapat mengawasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) penduduk agar lebih tepat sasaran bagi yang menerima.



5. Aparat desa dapat lebih aktif dalam melaporkan masyarakat baik yang pindah/migrasi maupun yang meninggal dunia ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Untuk dilakukan Validasi Data P3KE dan untuk Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebagai data tambahan.



BAB V P E N U T U P

5.1. KESIMPULAN

1. Secara Umum Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Selama lima tahun terakhir (2019-2023) jumlahnya berfluktuasi dari tahun ke tahun, Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun terakhir yaitu pada Maret 2023 sebesar 21,57 ribu jiwa atau 6,93 persen dari total penduduk dan merupakan yang terendah dibandingkan Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara. secara kumulatif upaya penanggulangan kemiskinan dalam periode tersebut berjalan efektif. Penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dan angka tersebut lebih tinggi dari penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan 8,70 persen dalam periode yang sama, yaitu Tahun 2023.
2. Penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat semata. Sangat banyak factor eksternal dan internal yang tidak dapat dikontrol (*uncontrollable*), justru sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan terus menerus, yang didukung secara penuh dari berbagai unsur, baik Pemerintah (Daerah maupun Pusat), Pengusaha, LSM, dan masyarakat luas.
3. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 sudah berupaya optimal dalam melakukan Penanggulangan Kemiskinan dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran yang sudah sangat signifikan



baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBDesa se-Kabupaten Luwu Timur.

4. Dalam melaksanakan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah membentuk lembaga pengelola program, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Lembaga ini bersifat lintas SKPD dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

5.2. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atau pun Pemerintah Pusat semata. Sangat banyak faktor eksternal dan internal yang tidak dapat dikontrol (*uncontrollable*), justru sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini diperlukan suatu gerakan penanggulangan yang bersifat komprehensif secara terus menerus dan didukung secara penuh dari berbagai unsur, baik Pemerintah (Daerah maupun Pusat), Pengusaha, LSM, dan masyarakat luas.

Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan sehubungan dengan upaya penanganan kemiskinan antara lain :



1. Penurunan kemiskinan terus diupayakan melalui empat Strategi Penanggulangan kemiskinan yaitu Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil, dan Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu lintas sektor.
2. Perlunya peran aktif dari Kelompok kerja (Pokja) dari Tim TKPKD kab. Luwu Timur yang telah dibentuk.
3. Perlu perhatian dan keseriusan semua stakeholder terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan.
4. Perluanya Penguatan Pada Bapelitbangda Selaku Pelaksana Pemutakhiran Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan juga kepada Dinas Sosial PP PA Selaku Pelaksana Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Data Penduduk Miskin Sebagai pedoman pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Para Camat dan Desa dapat mengawasi Program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes, swasta agar dapat lebih tepat sasaran.
6. Koordinasi dan Monitoring merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini terkait dengan penyusunan perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dalam hal kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah,



lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kedepannya

Malili, Juni 2024

Sekretaris TKPK Kab. Luwu Timur
Kepala Bapelitbangda

Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670912 198811 1 003